

**PENGARUH PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
KOMPETENSI LEGISLATIF, DAN KOMITMEN ORGANISASI
TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH (APBD) DPRD
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.AK)*



Oleh :

Nama : Desy Fitri Sari
Npm 1805170313
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama Lengkap : DESY FITRI SARI
N.P.M : 1805170313
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KOMPETENSI LEGISLATIF, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA DPRD SUMATERA UTARA


Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Penguji I Tim Penguji



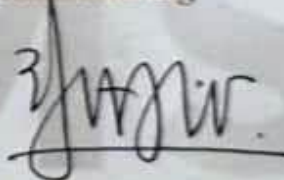
Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUMI, S.E., M.Si.)

Penguji II



(M. FIRZA ALPI, S.E., M.Si)

Pembimbing



(Dr. EKA NURMALA SARI, A.k., M.Si)

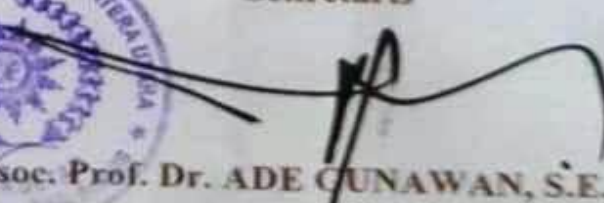
Panitia Ujian

Ketua



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : DESY FITRI SARI
N.P.M : 1805170313
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD), KOMPETENSI LEGISLATIF, KOMITMEN ORGANISASI, TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DPRD SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 12 September 2022

Pembimbing Skripsi

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE.Msi.,Ak.,CA)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. DR. ZULIA HANUM, SE., M.Si)



(H. JANURI, SE., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : DESY FITRI SARI
NPM : 1805170313
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : PENGARUH PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KOMPETENSI LEGISLATIF, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DPRD SUMATERA UTARA

Tanggal	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	—		
BAB 2	—		
BAB 3	Uji validitas & reliabilitas prekuensi.	10/9 22	3/
BAB 4	Tabel 4.2 prekuensi, tabel 4.3 prekuensi, hasil data dik. kasi	10/9 22	2/
BAB 5	Kesimpulan, simpulan smp. Smp. lu. open	12/9 22	2/
Daftar Pustaka	Daftar artikel dosen ds umms	12/9 22	3/
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ace skripsi lanjut ujian sidang	15/9 22	3/.

Medan, Agustus 2022

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, A.k., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567
Website: <http://www.umsu.ac.id>. Email: rector@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPS.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESY FITRI SARI
NPM : 1805170313
Prodi : Akuntansi
Konentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : **PENGARUH PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD), KOMPETENSI LEGISLATIF, KOMITMEN
ORGANISASI, TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA DPRD
SUMATERA UTARA**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dikutip sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang menyatakan

METERAI
TEMPEL
CCBAKX088307218

DESY FITRI SARI

1805170313

ABSTRAK

Desy Fitri Sari Npm : 1805170313. Pengaruh Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kompetensi Legislatif, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DPRD Sumatera Utara. Skripsi. 2022.

Penyusunan APBD merupakan kegiatan yang wajib di laksanakan untuk menggagarkan pengeluaran dan kepentingan setiap daerah, untuk mengetahui segala kebutuhan pengeluaran daerah di butuhkan sosok wakil rakyat yaitu DPRD.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kompetensi Legislatif, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DPRD Sumatera Utara. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh seluruh anggota DPRD Sumatera Utara sebanyak 100 responden. Sedangkan Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik purpose sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu sebanyak 73 responden. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji t, uji f dan koefisien determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (X_1) secara parsial memiliki terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Y), variabel Kompetensi Legislatif (X_2) secara parsial memiliki terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Y) dan variabel Komitmen Organisasi (X_3) secara parsial memiliki terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Y). Sedangkan nilai koefisien determinasi (Adjust R square) yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 56,8%. Sedangkan sisanya sebesar 43,2% dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kompetensi Legislatif, Dan Komitmen Organisasi, Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Pengertian Penyusunan (APBD).....	6
2.1.2 Pengertian Peranan Anggota DPRD dalam Penyusunan APBD	18
2.1.3 Kompetensi Legislatif	24
2.1.4 Komitmen Organisasi.....	28
2.2 Kerangka Penelitian yang Relevan	33
2.3 Kerangka Berpikir Konseptual	35
2.2.1 Keterkaitan Pengaruh Peran DPRD terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Keterkaitan Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Penyusunan APBD	Error! Bookmark not defined.
2.4 Hipotesis.....	37
BAB 3 METODE PENELITIAN	38
3.1 Metode Penelitian.....	38
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
3.4 Uji Instrumen.....	44
3.4.1 Uji Validitas	44
3.4.2 Uji Reliabilitas	46
3.5 Teknik Analisis Data.....	47
3.5.1 Uji Asumsi Klasik	47
3.5.1.1 Uji Normalitas	47
3.5.1.2 Uji Multikolinearitas	47
3.5.2 Analisis Regresi Linear Berganda	48
3.6.3 Uji Hipotesis.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Gambaran Umum Penelitian Penelitian.....	51
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian.....	52
4.2.1 Deskripsi Demografi Penelitian	52
4.2.2 Deskripsi Data Penelitian	54
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	56
4.3.1 Uji Normalitas	56
4.3.3 Uji Multikolinearitas.....	58
4.3.5 Uji Heteroskedasitas	59

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda	61
4.5 Uji Hipotesis	63
4.5.1 Uji Parsial (Uji t)	63
4.5.2 Uji Simultan (Uji F)	64
4.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)	65
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penetapan Apbd Sumatera Utara.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	40
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	42
Tabel 3.3 Jawaban Responden.....	44
Tabel 3.4 Uji Validitas	45
Tabel 3.5 Uji Reliabilitas	46
Tabel 4.1 Pengembalian Kuisisioner Penelitian	52
Tabel 4.2 Data Deografi Penelitian	53
Tabel 4.3 Skala Nilai	54
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Varibel.....	54
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Varibel Kompetensi Legislatif	55
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Varibel Komitmen Organisasi.....	55
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Varibel Penyusunan Apbd.....	56
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas	57
Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas	59
Tabel 4.10 Uji Heteroskedastisitas	59
Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	61
Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial (Uji T).....	63
Tabel 4.13 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	65
Tabel 4.14 Hasil (R^2)	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Gambar 4.1 Normal P-Plot Of Regression	58
Gambar 4.2 Uji Scatterplot	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian	73
Lampiran 2 Tabulasi Data Uji Coba Instrumen	77
Lampiran 3 Uji Validitas	79
Lampiran 4 Uji Reliabilitas	82
Lampiran 5 Tabulasi Angket Penelitian	83
Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik	87
Lampiran 7 Uji Hipotesis Dan Analisis Linier Berganda	89

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah kemudian dibahas dan disetujui secara bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah (Pasal 1 PP Nomor 58 Tahun 2005). Mekanisme penyusunan anggaran daerah berupa jadwal dan tahapan penyusunan serta penetapan apbd ditetapkan oleh pemerintah paling lambat per 3 Desember atau 1 bulan sebelum tahun anggaran berkenaan (Permendagri 13/2006).

Indikator keberhasilan DPRD, secara khusus Kota Sumatera Utara tercermin lewat kinerja yang baik hal itu membutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Sumberdaya manusia berkualitas adalah tingkat pendidikan yang tinggi akan mampu membantu seseorang menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kesesuaian latar belakang pendidikan juga berpengaruh dalam kinerja seseorang. Seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sama dengan bidang pekerjaannya cenderung lebih mengerti tentang masalah atau pekerjaan yang sedang dihadapinya. DPRD sebagai perwakilan rakyat adalah lembaga yang mempunyai peranan penting di dalam membangun tiap daerahnya. Anggota DPRD menyerap aspirasi dari masyarakat melalui partai politik, berhubungan dengan itu maka para anggota DPRD harus menyiapkan dirinya agar bisa

berupaya dalam demokrasi dan mampu mewujudkan tata pemerintahan yang ideal dan efektif di daerahnya. DPRD mempunyai tiga fungsi yang harus dijalankan yaitu fungsi menyusun pembentukan Perda, fungsi penganggaran dana APBD serta pengawasan dalam menyelenggarakan pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk uang selama periode tertentu. Anggaran ini digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja sebagai alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Saputra, W. A 2019:1).

Perencanaan dan penyusunan anggaran yang baik meliputi penyusunan kegiatan dan anggaran yang detail, tidak adanya anggaran yang diblokir serta tidak adanya tambahan/pergeseran anggaran yang sangat menentukan penarikan dana tepat waktu, sehingga manfaat dari kegiatan tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Realisasi anggaran yang maksimal harus juga diikuti dengan perencanaan anggaran yang baik, realisasi anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan suatu program atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Secara umum realisasi anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu (Abdul Halim dan Syam Kusufi, 2012:104).

Menurut Abdul Halim dan Syam Kusufi (2012:98) faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu perencanaan anggaran, proses penyusunan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen organisasi. Pada penelitian ini hanya menggunakan variabel kompetensi SDM dan komitmen organisasi sebagai variabel independen serta proses penyusunan anggaran sebagai variabel intervening.

Komitmen organisasi adalah keterikatan individu dengan organisasi, sehingga individu tersebut merasa memiliki dan berusaha mencapai tujuan organisasi. Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong pegawai untuk mencapai tujuan organisasi, memiliki persepsi yang positif dan melakukan yang terbaik untuk kepentingan organisasi. Sebaliknya, pegawai dengan komitmen organisasi yang rendah akan memiliki perhatian yang rendah untuk mencapai tujuan organisasi, bahkan cenderung mencoba memenuhi kepentingan pribadi (Sirin, dkk, 2020).

Dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan APBD, Anggota DPRD harus memiliki komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan hal yang cukup penting yang harus dimiliki oleh anggota DPRD. Komitmen organisasi merupakan cerminan sikap dewan yang terkait dengan loyalitas dan kesediaannya pada lembaga legislatif tempat anggota dewan bekerja. Dengan adanya cerminan sikap tersebut maka anggota dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan meningkatkan pengetahuan anggaran yang dimiliki dan menggunakan pengetahuan anggaran yang dimiliki dan menggunakan pengetahuannya secara lebih tepat dan lebih baik dalam mengawasi pelaksanaan APBD (Pramitha dan Indriani, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2002) mengenai pengaruh pengetahuan anggaran dan *Rules, Procedures, and Policies* (RPPs) membuktikan bahwa pengetahuan dewan berpengaruh positif terhadap peran dewan dalam pengawasan anggaran. Namun, RPPs tidak mempengaruhi peran dewan dalam pengawasan anggaran. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa pengetahuan anggaran anggota dewan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Namun, terjadi ketidak konsistenan hasil pada variabel yang memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang, permasalahan, fenomena serta ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai variabel yang pengetahuan anggaran dengan peran DPRD dalam pengawasan APBD inilah yang memotivasi penelitian ini dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengetahuan penganggaran mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan APBD dan apakah komitmen organisasi mempengaruhi interaksi antara pengetahuan penganggaran dan peran DPRD dalam pengawasan APBD.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya pengaruh peran dewan perwakilan rakyat daerah, kompetensi legislatif, dan komitmen organisasi terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pada Kantor DPRD Sumatera Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menyimpulkan Rumusan Masalah yaitu :

1. Apakah ada pengaruh peranan Anggota DPRD terhadap penyusunan APBD?
2. Apakah ada Pengaruh Kompetensi Legislatif Terhadap Penyusunan APBD?
3. Apakah ada Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap penyusunan APBD?
4. Apakah ada pengaruh Penyusunan Anggaran terhadap Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, bertujuan untuk menguji dan menganalisis;

1. Pengaruh Peranan Anggota DPRD terhadap penyusunan APBD.
2. Pengaruh Kompetensi Legislatif Terhadap penyusunan APBD.
3. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap penyusunan APBD.
4. Pengaruh Penyusunan Anggaran terhadap Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

1.5 Manfaat Penelitian

Untuk menambah wawasan peneliti khususnya tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta kompetensi legislatif dan komitmen organisasi serta menganalisis data karena adanya keterlambatan dalam penyusunan APBD.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodic yang disusun berdasarkan program yang telah disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (*budget*) merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dinyatakan dalam kesatuan unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu untuk masa yang akan datang.

Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi anggaran bukan tujuan dan tidak dapat digantikan manajemen. Dalam penyusunan anggaran perlu dipertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan.
- b. Data tahun-tahun sebelumnya.
- c. Kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi.
- d. Kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintah.
- e. Penelitian untuk pengembangan perusahaan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah meliputi rencana, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja dan pendapatan yang diharapkan dapat menutup kebutuhan belanja atau pembiayaan yang diperlukan. Anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan untuk periode anggaran, yaitu periode tahunan. Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik jika dalam penyusunannya tetap memperhatikan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Anggaran merupakan rencana yang menjabarkan tujuan dan kegiatan perusahaan dimasa yang akan datang yang bersifat kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan moneter (Sinaga, 2013).

Dalam penyusunan anggaran diperlukan partisipasi yang merupakan keikutsertaan dalam penyusunan anggaran. Partisipasi ini diperlukan untuk memotivasi pelaksana dalam mencapai sasaran anggaran. Evaluasi anggaran dilakukan dengan membandingkan antara apa yang dianggarkan dengan apa yang dicapai. Adanya umpan balik dari pimpinan juga dapat menjadi motivasi tersendiri untuk pelaksana dalam merealisasikan anggaran, dan yang terpenting adalah anggaran yang disusun tersebut harus jelas baik dari sasaran atau output yang akan dicapai. Dalam pengertian lain dapat dikatakan bahwa anggaran sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan :

- a. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
- b. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut. Perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut. Sedangkan anggaran publik merupakan

suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas (Nordiawan, 2006 :48). Selain itu, anggaran sektor publik memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Anggaran dinyatakan dalam satuan uang dan non-keuangan.
- b. Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu.
- c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- d. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

Hal-hal yang perlu dihindari terkait dengan penyusunan anggaran salah satunya adalah kesenjangan anggaran. Sehingga dapat disimpulkan anggaran sektor publik merupakan alat yang dibutuhkan manajemen untuk melaksanakan visi dan misi suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Tahapan penyusunan APBD hendaknya mengacu pada norma dan prinsip anggaran, sebagai berikut:

1. **Transparan dan Akuntabilitas**

Pemerintah daerah harus transparansi dalam memberikan informasi dalam mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat kepada masyarakat mengenai APBD dan setiap dana yang diperoleh penggunaannya harus dipertanggungjawabkan.

2. **Disiplin Anggaran**

Penyusunan APBD harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan adanya keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta harus berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu, dan tepat di pertanggungjawabkan.

3. **Keadilan Anggaran**

Pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh pemerintah harus digunakan secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam memberikan pelayanan.

4. Efisiensi dan Aktivitas Anggaran

Dana yang sudah tersedia harus digunakan sebaik-baiknya. Agar dapat menghasilkan mutu pelayanan dan kesejahteraan guna kepentingan masyarakat. Dalam perencanaan anggaran harus ditetapkan secara jelas mengenai tujuan, sasaran hasil serta manfaat yang akan didapat oleh masyarakat dari suatu program kegiatan.

5. Format Anggaran

APBD harus disusun berdasarkan format anggaran defisit untuk mengetahui adanya selisih antara pendapatan dan belanja yang akan mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.

Tahapan penyusunan Perda APBD akan dimulai dari kegiatan penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD, sosialisasi, penyampaian keada DPRD, pembahasan, pengambilan keputusan, evaluasi dan yang terakhir adalah penetapan APBD. Dalam proses penyusunan APBD dimulai dari penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan dokumen prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

Berikut langkah-langkah dalam proses penyusunan rancangan APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu:

1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada DPRD.
2. Penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).
3. Pembahasan KUA dan PPAS oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD.
4. Surat edaran kepala daerah tentang penyusunan RKA-OPD.
5. Penyusunan rencana kerja anggaran dan Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
6. Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumendokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.

7. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Pada dasarnya APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah untuk jangka waktu satu tahun yang disebut Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Kemudian penyusunan APBD didasarkan pada kewenangan penyelenggaran urusan pemerintahan yang terdiri dari dari urusan wajib dan urusan pilihan. Maka dari itu, anggaran belanja daerah harus diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2.1.1.1 Tujuan Anggaran

Tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab. Kejelasan tujuan anggaran dapat diketahui dari seberapa jelas tujuan anggaran yang akan dicapai dan seberapa jauh anggaran tersebut dapat dimengerti berdasarkan pada penjelasan-penjelasan yang ada dalam anggaran. Adapun tujuan dalam penyusunan anggaran, antara lain:

- A. Untuk menyatakan harapan/sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kesalahpahaman dan memberikan arahan terhadap apa yang hendak dicapai manajemen.
- B. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan.
- C. Untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.
- D. Untuk mengkoordinasikan cara/metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumberdaya.
- E. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan

kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi.

Menurut Nafari (2007) anggaran memiliki fungsi sebagai berikut :

A. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan didalam anggaran digunakan untuk menentukan rencana belanja dan sumber dana yang ada seefisien mungkin.

B. Fungsi Pelaksanaan

Anggaran dalam fungsi pengawasan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu mendapat persetujuan yang berwenang (terutama dalam hal keuangan).

C. Fungsi Pengawasan

Anggaran merupakan alat pengawasan atau pengendalian (*controlling*). Pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan, dengan cara :

1. Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran).
2. Melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu (atau bila terdapat penyimpangan yang merugikan).

Sehingga dapat disimpulkan anggaran berfungsi sebagai alat perusahaan untuk membantu manajemen dalam melaksanakan setiap keputusan yang ditetapkan. Anggaran digunakan untuk memberikan motivasi kepada bawahan mengenai progres kinerja pegawai. Anggaran sebagai perencanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional didalam perusahaan atau organisasi. Tujuan anggaran juga menganalisis dan memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

2.1.1.2 Manfaat Anggaran

Anggaran memiliki banyak manfaat (Nafarin 2004), antara lain:

- a. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama melalui anggaran setiap kegiatan yang akan dilaksanakan akan mengarah atau menuju satu hasil tujuan yang sama.

- b. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai anggaran ini dapat digunakan untuk atasan menilai kelebihan dan kekurangan pegawai melalui kinerja.
- c. Dapat memotivasi pegawai. Anggaran bisa menjadi salah satu motivasi pegawai dalam mencapai target anggaran
- d. Menimbulkan rasa tanggung jawab kepada pegawai akibat yang ditimbulkan dari anggaran adalah rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan atau apa yang telah dipercayakan atasan kepada pegawai.
- e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Dari segi biaya, anggaran dapat meminimalisir terjadinya pemborosan atau pembengkakan dana perusahaan.
- f. Dari sisi manajemen, pemanfaatan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan dan dana akan terstruktur dengan rapi dan jelas.
- g. Alat pendidikan bagi manajer dalam mengelola keuangan atau biaya operasional perusahaan.

Manfaat anggaran menurut (Ahyari 1988) adalah sebagai berikut:

- a. Terdapatnya perencanaan terpadu dengan mempergunakan anggaran perusahaan akan dapat menyusun perencanaan seluruh kegiatan secara terpadu, tidak ada satupun kegiatan perusahaan yang terlepas dari anggaran.
- b. Terdapatnya pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan, dengan adanya anggaran perusahaan maka pelaksanaan kegiatan yang ada dalam perusahaan tersebut dapat dilaksanakan dengan pasti, karena dapat mendasarkan diri kepada anggaran yang telah ada.
- c. Terdapatnya alat koordinasi dalam perusahaan. Pelaksanaan kegiatan didalam perusahaan dibawah koordinasi yang baik, hal ini karena didalam penyusunan anggaran tersebut sudah dipertimbangkan kaitan satu dengan bagian anggaran lainnya.
- d. Terdapatnya alat pengawasan yang baik. Alat pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di perusahaan. Jika perusahaan sedang menyelesaikan suatu kegiatan maka manajemen perusahaan akan dapat membandingkan pelaksanaan kegiatan tersebut.
- e. Terdapatnya evaluasi kegiatan perusahaan. Alat pengawasan berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan di perusahaan. Jika perusahaan sedang menyelesaikan suatu kegiatan maka manajemen perusahaan akan dapat membandingkan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan anggaran memiliki banyak manfaat yang dapat meningkatkan kinerja dari pegawai karena anggaran dianggap sebagai alat pengawasan manajer. Anggaran dapat dijadikan sarana untuk mengevaluasi setiap kegiatan dilaksanakan. Sehingga manfaat anggaran dapat dirasakan oleh seluruh anggota perusahaan tersebut

2.1.1.3 Indikator Kesenjangan Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD)

Kesenjangan anggaran merupakan perbedaan atau selisih anggaran yang dilakukan dengan cara mengecilkan pendapatan dan memperbesar biaya untuk mempermudah pencapaian target anggaran. Menurut Dewi dan Erawati (2014). Beberapa indikator kesenjangan anggaran dari penelitian yang dilakukan oleh Anggasta (2014) adalah sebagai berikut :

1. Standar Anggaran, standar anggaran merupakan acuan atau pedoman yang digunakan dalam penetapan suatu anggaran yang telah disusun.
2. Sasaran anggaran, sasaran anggaran adalah suatu ukuran tercapai tidaknya tujuan dari penyusunan anggaran.
3. Target Anggaran, Target anggaran adalah tujuan dari suatu anggaran yaitu terealisasinya anggaran yang telah disusun.

Beberapa indikator kesenjangan anggaran dari penelitian yang dilakukan oleh Ardila (2013) adalah sebagai berikut:

1. Standar yang digunakan, Standar anggaran yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan suatu anggaran.
2. Pelaksanaan anggaran, Pelaksanaan anggaran setelah anggaran disetujui bersama oleh semua pihak yang terlibat.
3. Pengawasan anggaran, anggaran dilaksanakan dan diawasi sesuai dengan fungsi pengawasan anggaran.
4. Pertanggung jawaban Anggaran. Anggaran setelah dibuat dan disepakati selanjutnya akan dilaksanakan dan pada akhirnya nanti akan diminta pertanggung jawaban sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.
5. Realisasi Anggaran, Realisasi anggaran merupakan biaya yang dikeluarkan ketika dibelanjakan.

Sehingga dapat disimpulkan indikator dari variabel kesenjangan anggaran tidak lepas dari target anggaran, sasaran anggaran, dan realisasi anggaran serta pertanggung

jawaban yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Indikator digunakan sebagai acuan untuk membatasi atau memperjelas bagian kesenjangan anggaran yang dimaksud.

2.1.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan APBD

Menurut Elizar & Pohan (2016) dalam Nirzawan (2011) menyatakan bahwa Penilaian Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, Standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan. Tuntutan pentingnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ternyata membawa dampak dalam beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan APBD berbasis kinerja, antara lain sebagai berikut:

1. Gaya dan Kepemimpinan komitmen dari seluruh komponen organisasi.
2. Penyempurnaan sistem administrasi secara terus-menerus.
3. Sumber daya yang cukup.
4. Penghargaan reward yang jelas.
5. Sanksi (*punishment*) yang tegas.

Dengan adanya kelima faktor ini dapat berpengaruh positif terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Berbasis Kinerja di Pemerintah Kota. Sehingga dapat menjadi indikator pencapaian pengukuran kinerja yang dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sumatera Utara.

2.1.1.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indikator Proses Penyusunan APBD

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai

pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD). Dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah negara yang baik, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, efektif, efisien, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan maka ditetapkan UU RI No. 15 Tahun 2004.

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran ini akan semakin penting apabila dikaitkan dengan mekanisme penyusunan dan penetapan APBD yang berlangsung saat ini diharapkan semakin tinggi kapabilitasnya dalam melakukan penyusunan (APBD). Banyak permasalahan yang timbul ketika reses yang dihadapi baik oleh anggota dewan maupun masyarakat. Beberapa faktor penghambat anggota dewan adalah sebagai berikut :

1. Waktu dalam melakukan pertemuan dengan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Informan di peroleh informasi bahwa, waktu atau jadwal yang telah di tetapkan untuk reses ke lapangan kadang menjadi kendala kita anggota Dewan untuk melaksanakan reses, dimana biasanya jadwal telah tersusun dengan baik dan kita siap turun kelapangan, ada saja kegiatan mendadak, misalnya kita harus menghadiri rapat kerja di pusat, kedatangan tamu dari luar daerah, dan menghadiri acara yang tidak dapat di tinggalkan, karena undangan atau acara datangnya tidak dapat kita jadwalkan, yang akhirnya jadwal yang di rencanakan untuk bertemu dengan konstituen tertunda, tentu ini akan berdampak kepada kekecewaan masyarakat dimana daerah yang akan di kunjungi, sehingga masyarakat beranggapan bahwa anggota dewan ingkar janji, anggota Dewan tidak mau datang dan sebagainya, karena jauh sebelum berkunjung , kita meminta pihak aparaturnya di tingkat Kecamatan dan desa untuk mempersiapkan sesuatu dan mengundang masyarakat dalam pertemuan yang telah di jadwalkan. Selain itu meskipun kita bisa melakukan reses kelapangan waktu yang ada tidak cukup, mengingat desa-desa yang kita kunjungi cukup banyak dan luasnya wilayah jangkauan sehingga waktu yang tersedia tidak cukup, dan pada akhirnya tidak semua desa dapat kita kunjungi.

2. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan wawancara dari tokoh masyarakat terungkap fakta bahwa, kurangnya partisipasi masyarakat ketika kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota Dewan, meskipun masyarakat telah di beritahu dan di undang untuk hadir, ternyata hanya sedikit masyarakat yang hadir, ini bukan tidak ada penyebabnya, hal ini disebabkan karena kekecewaan masyarakat itu sendiri terhadap anggota dewan karena kegiatan ini bukan baru sekali atau dua kali saja dilakukan di desa, aspirasi yang di sampaikan terkesan percuma, dan anggota dewan datang ke desa kami hanya menunaikan kewajibannya saja tidak datang dengan niat benar-benar ingin membantu masyarakat keluar dari permasalahannya.

3. Dana yang terbatas dari pemerintah dalam merealisasikan pembangunan.

Banyak faktor yang merupakan penghambat bagaimana sebuah aspirasi masyarakat terbangun ketika dalam perumusan kebijakan publik dalam APBD, karena dalam pembahasan anggaran yang pada mulanya di masukan program-program yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Yang menjadi masalah adalah ketika masukan atau informasi atau permintaan dari masyarakat tersebut tidak dapat diwujudkan karena alasan anggaran daerah tidak mencukupi untuk menampung aspirasi masyarakat yang masuk melalui kami dan telah kami sampaikan, karena pemerintah daerah dalam membahas anggaran lebih kepada rumusan skala prioritas untuk mengimbangi kemampuan keuangan daerah. Hal ini akan menjadi sebuah pertanyaan bagi masyarakat tentang permasalahan dan masukan mereka mengapa tidak dapat terealisasi, masyarakat akan beranggapan bahwa Anggota Dewan tidak memperjuangkan tentang tuntutan masyarakat saat reses di lapangan, padahal tidak demikian, kami anggota Dewan sudah menyampaikan aspirasi tersebut. Adapun fakto-faktor yang mempengaruhi peran dprd dalam penyusunan apbd yaitu sebagai berikut:

A. *Personal Background*

Menurut Sastroatmodjo (2006) dalam (Nurharyati, 2013) terdapat dua tingkat orientasi politik yang mempengaruhi perilaku politik, yaitu sistem dan individu. Lemahnya peran DPRD dalam kesalahan penyusunan (APBD) mungkin dikarenakan oleh lemahnya sistem politik atau individu sebagai aktor politik.

B. Political Background

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku lembaga politik dalam hal ini DPRD adalah budaya politik Almond dan Verba, (2009) dalam Witono dan Murni, (2013). Sebagai sebuah perwujudan dari sikap politik, perilaku politik tidak dapat dipisahkan dari political background. Political background ini meliputi beberapa dimensi, yaitu: pengalaman politik, pengalaman di DPRD, latar belakang partai politik, latar belakang ideologi partai politik dan asal komisi.

C. Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran

Pengetahuan merupakan persepsi responden tentang anggaran (APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran. Sedangkan Nur dan Bambang (2012 Hal 78) di kutip oleh Sjamsudin dan Syamsiar, (2012) menyebutkan bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Dengan demikian pengetahuan tentang sesuatu merupakan dasar bagi siapa saja dalam melakukan suatu tindakan atau bersikap terhadap sesuatu tersebut.

2.1.2 Pengertian Peranan Anggota DPRD dalam Penyusunan APBD

Peran DPRD di Indonesia sebenarnya secara umum masuk dalam dua bentuk perwakilan, yaitu perwakilan politik dan perwakilan fungsional, perwakilan politik diemban melalui pemilihan umum sedangkan perwakilan fungsional dilakukan melalui pengangkatan pada saat terpilih. Sejak tahun 2004, rakyat Indonesia telah memilih secara langsung calon anggota legislatif nya, yang memperlihatkan bahwa kewenangan dan kekuasaan yang diperoleh anggota DPRD sebenarnya adalah kepercayaan dari rakyat yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Mandat politik, mengandung arti

bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota-anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan mandat rakyat, Dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan-keputusan politik/kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sebenarnya memperjuangkan aspirasi konstituen atau masyarakat merupakan suatu kewajiban anggota DPRD, ini sesuai sumpah janji mereka saat mereka dilantik menjadi anggota DPRD, seperti tertuang dalam: Sumpah Jabatan anggota DPRD (UU 22/2003, tentang Susduk, pasal 72).

Pergantian Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah didahului dengan pergantian undang-undang bidang politik, antara lain: UU nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu; UU nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD diperbaharui dengan UU nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dalam suasana reformasi maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga mengalami amandemen sebanyak empat kali (tahun 1999, 2000, 2001 2002) dan khusus menyangkut pasal 18 tentang Pemerintah daerah mengalami perubahan dan penambahan isi yang cukup signifikan. Sesuai dengan kondisi politik saat itu maka rumusan tentang kedudukan DPRD dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan mendasar. Hal itu terlihat dalam rumusan tentang pemerintahan daerah.

Dalam rumusan pasal 3 ayat (1) UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan :

1. Pemerintah Daerah, Pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas Pemerintah

Daerah provinsi dan DPRD provinsi.

2. Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.

Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah (tidak hanya menyetujui *draft* yang dipersiapkan oleh pemerintah) dan berperan penting dalam proses penganggaran daerah. Harton menjelaskan bahwa, peranan (role) merupakan suatu kumpulan harapan atau perilaku yang berhubungan dengan posisi dalam struktur sosial, atau konsep tentang apa yang dilakukan atau perilaku individu dalam organisasi sesuai dengan kedudukan (status) yang dimilikinya. Peranan terbentuk atas norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi peranan menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu-individu ataupun kelompok-kelompok yang akan melakukan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu atas tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kedudukan dan kedudukannya.

Fungsi ini juga menempatkan anggota DPRD untuk terlibat dalam siklus tahunan penganggaran daerah. Keterlibatan anggota DPRD perempuan dalam proses penyusunan RAPBD semuanya tidak mempunyai peran yang sama, karena setiap anggota DPRD perempuan ditempatkan dalam alat kelengkapan DPRD yang berbeda-beda.

2.1.2.1 Kedudukan dan Fungsi DPRD

Kedudukan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan pasal 76 UU nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten/kota, yang terdiri dari fungsi DPRD adalah, DPRD sebagai Legislasi, DPRD sebagai Anggaran, dan DPRD sebagai Pengawasan. Hal ini dinilai lagi dalam penjelasan pasal 61 dan pasal 77 UU nomor 22 tahun 2003. Yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah legislasi daerah

yang merupakan fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama Kepala Daerah. Adapun yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD bersama-sama dengan Pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. Penjelasan mengenai fungsi penyusunan apbd adalah fungsi DPRD untuk melaksanakan penyusunan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, APBD dan Keputusan Kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2.1.2.3 Tugas dan Wewenang DPRD

Tugas dan wewenang DPRD sesuai dengan isi pasal 42, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah:

- a) Membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b) Membahas dan menyetujui Rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan Peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah
- d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota.
- e) Memiilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
- g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

- h) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i) Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah
- j) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
- k) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

2.1.2.2 Hak dan Kewajiban DPRD

Dalam pasal 43 UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa DPRD mempunyai hak interpelasi, hak angket serta hak menyatakan pendapat. Yang dimaksud dengan hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.

Adapun yang dimaksud dengan hak angket adalah pelaksanaan fungsi penyusunan APBD yang dilakukan oleh DPRD untuk penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara. Terakhir tentang hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau sebagai lembaga mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Dari penjelasan 3 hak DPRD ini menempatkan kepala daerah hanya sekedar untuk mendengarkan “uneg-uneg” DPRD dan menjawab dengan kalimat “akan memperhatikan”. Hak ini tidak tegas dan tidak jelas apa akibat atau sanksi apabila kepala daerah tidak menjalankan saran atau rekomendasi DPRD. Selain hak, DPRD juga mempunyai kewajiban dalam menjalankan tugasnya. Kewajiban DPRD menurut pasal 45 UU nomor 32 tahun 2004

adalah :

- a) Mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- b) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2.3 Tujuan dan Manfaat Peran DPRD dalam APBD

Hal ini tercantum dalam pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasannya “DPRD bertujuan untuk meningkatkan kinerja APBD serta merancang dan membahas Rancangan Undang-undang”. Adapun terkait dengan kelembagaan DPR, dalam menjalankan tugasnya DPR mempunyai tiga fungsi sesuai dengan Pasal 20A ayat 1 UUD NRI 1945, yaitu:

1. Fungsi Legislasi, yaitu DPR mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undang bersama-sama dengan Presiden. Usulan Rancangan Undang-Undang dapat diajukan oleh Presiden, dapat pula berdasarkan hak inisiatif DPR.
2. Fungsi Anggaran, yaitu kewenangan DPR untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh pemerintah (Presiden).
3. Fungsi Pengawasan, yaitu DPR mempunyai fungsi untuk menjalankan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Pengawasan DPR terhadap pemerintah dapat berupa pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN, dan kebijakan pemerintah lainnya berdasarkan UUD NRI 1945.

2.1.2.4 Indikator Kinerja DPRD dalam penyusunan APBD

Kinerja adalah hasil dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama satu periode waktu tertentu. Kinerja dapat di lihat dari berbagai sudut pandang tergantung pada tujuan organisasi masing-masing. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat di capai suatu organisasi atau sekelompok orang atau individu atas suatu pelaksanaan tugas yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya dalam kurun waktu tertentu dengan cara yang benar.

Pemahaman kinerja DPRD adalah sebagai prestasi kerja seorang pegawai dan prestasi kerja tersebut dinilai berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan yang ditetapkan oleh lembaga/organisasi Menurut Prabu Mangkunegara (2007:56). Keban T. Yeremias (2010:32) mengatakan bahwa istilah kinerja yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai penampilan, untuk kerja atau prestasi. Sehingga dapat ditarik sebuah definisi tentang kinerja adalah kerja seorang pegawai secara terstruktur berdasarkan tugas dan wewenang sesuai dengan tanggung jawabnya dan hasil kerja tersebut terus menerus dievaluasi. Prawirosentono (1999:27) mengemukakan beberapa faktor yang dapat dijadikan ukuran kinerja, yaitu:

1. Efektivitas
2. Otoritas dan Tanggungjawab
3. Disiplin
4. Inisiatif

2.1.3 Kompetensi Legislatif

Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasar berupa keahlian, ketrampilan, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki seorang dan dapat berpengaruh langsung terhadap pekerjaannya McClelland, (1973). Kompetensi menyangkut kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas atau mengambil keputusan sesuai dengan perannya dalam organisasi yang relevan dengan keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya Rivai dan Sagala, (2009 Hal 290). Kompetensi dibutuhkan agar seseorang agar dapat melaksanakan tugas secara efektif dan sukses. Oleh karena itu, Kompetensi Jabatan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah kompetensi yang dibutuhkan dan/ atau dipersyaratkan untuk pelaksanaan tugas jabatan.

Yang mencakup lembaga legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

MPR berwenang menyusun atau mengubah Undang-Undang Dasar dan melantik atau memberhentikan presiden. MPR adalah sebuah lembaga legislatif bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat atau merumuskan UUD yang ada di sebuah negara. Lembaga legislatif juga merupakan lembaga legislator yang berarti jika lembaga ini dijalankan oleh DPD, DPR, dan MPR. Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga legislatif yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Adapun anggota DPR yaitu mereka yang berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu yang sudah terpilih saat pemilu. Montesquieu dalam teori trias politika mengemukakan, Lembaga Legislatif merupakan wakil rakyat yang diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya.

Menurut CF. Strong, Lembaga Legislatif merupakan lembaga dengan memegang kekuasaan pemerintahan yang mengurus pembuatan suatu produk hukum, sejauh hukum tersebut memerlukan kekuatan undangundang (statutory force). Hal tersebut juga dipertegas oleh Hans Kelsen, bahwa fungsi legislatif merupakan suatu pembentukan norma umum yang dilakukan oleh organ khusus, yang disebut sebagai Lembaga Legislatif. Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa DPRD adalah lembaga yang legislate atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa DPRD merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Selanjutnya menurut Fuad, mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan masyarakat daerah secara luas. Permasalahan dalam hubungan keagenan yang terjadi di legislatif merupakan sebuah perilaku oportunistik dengan adanya dominasi kekuasaan yang cenderung dipegang

oleh legislatif atau DPRD. Penganggaran merupakan sebuah proses legislatif, apapun yang dibuat eksekutif dalam proses anggaran pada akhirnya bergantung pada legislatif karena legislatif mempunyai kekuasaan untuk mengesahkan atau menolak usulan anggaran yang diajukan eksekutif dengan berbagai macam pertimbangan. Perilaku oportunistik tersebut dapat terjadi pada setiap tahapan penyusunan selagi itu melibatkan eksekutif dan legislatif.

2.1.3.1 Tujuan dan Manfaat Kompetensi Legislatif

Adapun beberapa tujuan dan manfaat dari Kompetensi Legislatif, sebagai berikut:

1. Untuk mengawasi implementasi undang-undang dalam badan eksekutif.
2. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.
3. Mengajukan rancangan UUD yang memiliki kaitan dengan otonomi daerah

2.1.3.2 Indikator Proses Penyusunan Fungsi Legislasi

Kewenangan fungsi legislasi yang secara dominan sudah dimiliki oleh dewan belum bisa diperankan secara maksimal. Banyak kritik telah disampaikan oleh berbagai kalangan terhadap lemahnya kompetensi dewan dalam menjalankan fungsi legislasi ini. Pusat studi Hukum dan Kebijakan yang bergerak dalam kerja-kerja perbaikan system hokum dan kebijakan menilai bahwa fungsi legislasi dewan saat ini bergerak tanpa visi yang jelas.

Sejauh ini berbagai kritik yang menilai rendahnya kompetensi dewan dalam menjalankan fungsi legislasi belum di dasarkan pada kriteria-kriteria dan indikator yang konkrit. Tingkat kemampuan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan fungsinya dapat dilihat dari masing-masing individual level of competency. Kompetensi seperti ini sangat tergantung pada kemampuan, kecakapan, keahlian dan pengetahuan masing masing anggotanya terhadap bidang-bidang yang berkaitan dengan tugas-tugas DPRD. Thoha (2002) mengemukakan.

Secara umum indikator kompetensi merupakan ukuran untuk lihat sejauh mana

seseorang atau organisasi sudah menjalankan fungsi yang di emban. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi legislasi yang dimiliki oleh anggota dewan atau dewan secara institusional, indicator kompetensi memperlihatkan tanda atau ukuran keberhasilan kerja-kerja politik yang telah dilakukan oleh para anggota dewan.

Indikator kompetensi dewan dalam menjalankan fungsi legislasi ini dapat dilihat dari berbagai segi berikut:

1. Kinerja atau Etos kerja yang dimiliki anggota dewan
2. Tingkat kompetensi yang dimiliki oleh para anggota dewan
3. Tingkat responsifitas yang dimiliki anggota dewan terhadap konsituen yang diwakili
4. Penggunaan hak-hak yang dimiliki, khususnya hak yang terkait dengan pemaksimalan fungsi legislasi

2.1.3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi Lesgilatif Anggota DPRD

Peran DPRD sebagai badan legislatif daerah, lembaga perwakilan rakyat daerah, wahana untuk melaksanakan demokrasi dan sebagai kontrol terhadap jalannya pemerintahan di daerah dapat dijabarkan sebagai badan Legislatif daerah sebagai berikut:

1. Bersama Kepala Daerah membentuk Peraturan Daerah (PERDA)
2. Bersama Kepala Daerah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
3. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.

Adapun faktor faktor yang berpengaruh kepada kompetensi legislatif, yaitu:

1. Etika dan moral belum dijadikan penentu.
2. Sistem rekrutmen para anggota.
3. Kualitas pendidikan dan pengalaman para anggota.
4. Rendahnya motivasi para anggota untuk kepentingan rakyat
5. Sistem pemerintah yang dipergunakan.

2.1.4 Komitmen Organisasi

Menurut Luthans (2006:249), komitmen organisasi didefinisikan sebagai (1) keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, (2) keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi dan, keyakinan atas penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Moyday, et al. (1979) juga menyatakan komitmen organisasi sebagai sikap merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan di mana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. Komitmen organisasi yang tinggi sangat diperlukan dalam sebuah organisasi, karena terciptanya komitmen yang tinggi akan mempengaruhi situasi kerja yang profesional (Zurnali, 2010:70). Dimensi komitmen organisasional merupakan tingkat dimana individu memihak dan ingin secara kontinyu berpartisipasi aktif dalam organisasi, Allen dan Meyer (1990) mengklasifikasikan komitmen organisasional ke dalam tiga dimensi, yaitu: komitmen afektif (*affective commitment*), komitmen *continuance* (*continuance commitment*), dan komitmen normatif (*normative commitment*).

Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja yang dalam hal ini individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai yang ingin dicapai dalam organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasikerja serta mempunyai keinginan kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi kerja tersebut (Pramita dan Andriyani, 2010). Komitmen organisasi juga merupakan nilai personal yang mengacu pada sikap loyal pada organisasi tempat bekerja. Komitmen organisasional sering diartikan secara individu dan berhubungan dengan keterlibatan orang tersebut pada organisasi yang bersangkutan. Komitmen pegawai pada organisasi merupakan salah satu sikap yang mencerminkan perasaan suka atau tidak suka seorang pegawai terhadap tempat pegawai yang bersangkutan

bekerja. Berikut tiga karakteristik yang berhubungan dengan komitmen organisasi (Lubis, 2010) :

1. Keyakinan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai dan tujuan organisasi.
2. Kemauan untuk sekuat tenaga melakukan yang diperlukan untuk kepentingan organisasi.
3. Keinginan yang kuat untuk menjaga keanggotaan dalam organisasi.

Menurut Feris dan Aranya (1987) dalam Lubis (2010) indikator-indikator komitmen organisasi menyangkut tiga sikap yaitu, pertama, rasa mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, yaitu suatu kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan serta nilai-nilai dari organisasi atau profesi. Kedua, rasa keterlibatan dengan tugas organisasi atau profesi yaitu mempunyai kemauan untuk melakukan kinerja dengan sungguh-sungguh. Ketiga, rasa kesetiaan pada organisasi atau suatu keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi atau profesi.

Komitmen organisasi terbangun apabila setiap individu mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan berikut terhadap organisasi atau profesi :

1. Identifikasi (*identification*), yaitu pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi.
2. Keterlibatan (*involvement*), yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan.
3. Loyalitas (*loyalty*), yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal.

Menurut Robbins dan Judge (2009) terdapat tiga jenis mengenai komitmen organisasi, yaitu :

1. Komitmen afektif (*affective commitment*) terjadi apabila pegawai ingin menjadi

bagian dari organisasi karena ikatan emosional (*emotional attachment*) atau psikologis terhadap organisasi.

2. Komitmen kontinu (*continuance commitment*) muncul apabila pegawai tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan-keuntungan lain, atau karena pegawai tersebut tidak menemukan pekerjaan lain. Dengan kata lain, pegawai yang bersangkutan tinggal di organisasi tersebut karena dia membutuhkan organisasi tersebut.
3. Komitmen normatif (*normative commitment*) timbul dari nilai-nilai diri pegawai. Pegawai tetap bertahan menjadi anggota suatu organisasi karena memiliki kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi tersebut merupakan hal yang memang harus dilakukan. Jadi, pegawai tersebut tinggal di organisasi itu karena ia merasa berkewajiban untuk tetap bertahan.

Dari ketiga jenis komitmen tersebut, komitmen afektif adalah jenis yang seharusnya dimiliki oleh para pegawai. Pegawai yang memiliki loyalitas, yaitu pegawai yang mempunyai komitmen afektif akan cenderung setia dan bertahan terhadap organisasi. Pegawai tersebut akan melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan rela melakukan pekerjaan tambahan untuk organisasi dan memberikan saran-saran bagi perbaikan serta kemajuan organisasi.

2.1.4.1 Tujuan dan Manfaat Komitmen Organisasi

Manfaat Komitmen Organisasi, Komitmen organisasi menentukan berapa lama karyawan akan tinggal bertahan dalam suatu organisasi, maka bisa dikatakan bahwa karyawan yang berkomitmen adalah aset setiap organisasi. Beberapa ini beberapa manfaat dan keuntungan utama dari komitmen organisasi diantaranya yaitu:

1. Produktivitas Karyawan Yang Tinggi, Karyawan yang berkomitmen sangat produktif. Mereka percaya pada organisasi, tujuan, visi, misi, dan kepemimpinan tim. Karyawan ini tidak hanya menunjukkan tingkat produktivitas yang tinggi, tetapi mereka juga memastikan rekan kerja dan anggota tim mereka juga menunjukkan hal yang sama.

2. Mengurangi Ketidak hadiran, Staf yang berkomitmen dan termotivasi akan melaporkan ketidakhadiran yang jauh lebih sedikit daripada rekan-rekan mereka. Karyawan yang memiliki komitmen terhadap organisasi berharap bisa bekerja, menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas mereka, membantu proyek, dan memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi.
3. Pemain Tim yang luar biasa, Karena karyawan yang berdedikasi banyak berinvestasi dalam berorganisasi dan itu sukses. Mereka berkontribusi secara signifikan untuk meningkatkan produktivitas tim.
4. Pendukung yang kuat, karyawan yang berdedikasi dan berkomitmen percaya pada organisasi mereka. Selain itu juga mereka memiliki kepercayaan yang tinggi dan memberikan dukungan kepada produk, layanan, dan kebijakan perusahaan.

Secara umum, adapun tujuan dari komitmen organisasi, yaitu:

1. Bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas.
2. Meningkatkan nilai budaya ditempat kerja.
3. Mampu membentuk loyalitas tingkat tinggi terkait dengan kinerja bisnis yang unggul.
4. Membentuk loyalitas tingkat tinggi terkait dengan kinerja bisnis yang unggul.
5. Memiliki kinerja yang baik untuk berorganisasi.

2.1.4.2 Indikator Komitmen Organisasi

Tidak semua orang menyadari bahwa komitmen tidak hanya tentang perasaan loyalitas yang pasif. Seseorang yang memiliki perasaan aktif terhadap hubungan dirinya dengan organisasi yang memiliki tujuan yang sama, terdapat 3 faktor atau indikator yang menjadi pengaruh komitmen organisasi, yakni sebagai berikut :

1. Kepercayaan & penerimaan yang kuat terhadap tujuan serta nilai-nilai organisasi.
2. Keinginan untuk mengusahakan terwujudnya kepentingan organisasi.
3. Memiliki kehendak yang sangat kuat untuk mempertahankan keanggotaan organisasi.

2.1.4.3 Indikator Penyusunan Proses Anggaran

Proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target, dan kebijakan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat krusial bagi kesuksesan anggaran. Di tahap ini proses distribusi sumber daya mulai dilakukan. Pencapaian konsensus alokasi sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran. Proses panjang dari penentuan tujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering diabaikan. Kondisi inilah yang tampaknya secara praktis sering terjadi.

Penyusunan anggaran dilakukan dengan tujuan agar anggaran yang ditetapkan nantinya bisa sesuai dengan keadaan yang terjadi. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan ciri dari penyusunan anggaran yang menekankan kepada partisipasi aparat pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan proses penyusunan anggaran.

Pada sektor publik, partisipasi anggaran dilakukan ketika antara pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat bekerja sama dalam pembentukan anggaran. Unit SKPD (masing- masing instansi/dinas/kantor) membuat usulan-usulan yang kemudian disampaikan kepada Kepala Bagian, Kepala Bagian menyampaikan usulan tersebut kepada Kepala Daerah, kemudian Kepala Daerah bersama DPRD membahas anggaran tersebut, hasil dari pembahasan tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai anggaran yang tentunya dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

2.1.4.3 Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi

Menurut Allen dan Meyer (1990), terdapat tiga faktor yang akan memengaruhi komitmen organisasi yakni sebagai berikut :

1. Pengalaman Organisasi

Pengalaman organisasi ini mencakup kepuasan dan motivasi anggota organisasi selama berada dalam organisasi. Peran dalam organisasi dan ketertarikan antara anggota dan supervisor pimpinan pada organisasi tersebut.

2. Karakteristik Organisasi

Organisasi ini mencakup hal yang berkenaan dengan struktur organisasi, desain kebijaksanaan dalam organisasi serta bagaimana kebijakan organisasi disosialisasikan.

3. Karakteristik Pribadi Individu

Karakter pribadi individu ini terbagi dua yakni *variabel demografis & variabel disposisional*. Adapun variabel demografis ini meliputi jenis kelamin, status pernikahan, usia, tingkat pendidikan dan lamanya seseorang bekerja dalam sebuah organisasi. Sementara faktor disposisional ini meliputi kepribadian dan nilai yang dimiliki oleh para anggota organisasi, variabel ini berkaitan kuat dengan komitmen organisasi, karena terdapat perbedaan pengalaman dari setiap anggota organisasi tersebut.

2.2 Kerangka Penelitian yang Relevan

Penelitian sebelumnya menggunakan beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang bersumber dari beberapa jurnal ilmiah yang mempunyai hal serupa dengan penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Tahun	Variabel	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Data/Sampel	Teknik Analisis	
1.	Nordiawan,	Penyusunan	Data dikumpulkan	Dianalisis dengan	Adanya keterlambatan dalam

2	Deddi. 2008 Sri Hidayati, Prayitno Basuki, Sri Pancawati, 2015	apbd, peran dprd, komitmen organisasi, kompetensi legislatif. Pengaruh partisipasi anggaran, Personal background, Political background, Pengetahuan dewantentang anggaran, Pengawasan keuangan daerah	dengan melalui anket penyebaran kusioner kepada 50 prang anggota dewan dari 100 orang. Penyusunan RKA Pengumpulan data dengan cara penyebaran kusioner (Personally Administered Questioners) kepada seluruh anggota DPRD se-eks Karisidenan Surakarta dengan metode <i>simple random sampling</i>	menggunakan regresi linear berganda Dianalisis dengan menggunakan uji validasi, uji reabilitas Metode analisis datayang digunakan adalah MANOVA (Multivariate Analysis of Variance)	penyusunan apbd Penyusun RKA dan Asimetri Informasi terhadap Efektifitas Anggaran. Personal background dan political backgroun tidak berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, Pengetahuan dewantentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah
3	Winarna dan Murni/2007				
4.	Mayasari 2012	Kualitas anggota dewan, Akuntabilitas publik, Partisipasi masyarakat, Transparansi kebijakan publik, Pengawasan APBD	Metode pengumpulan data adalah metode survey dengan cara membagikan kusioner kepada responden yaitu anggota DPRD pada 9 daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dengan teknik purposive sampling dengan kriteria anggota dewan yang membidangi perekonomian dan keuangan yang berjumlah 91 orang.	Teknik analisis yang digunakan regresi linier sederhana dan Moderated Regression Analysis (MRA).	Kualitas anggota dewan berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD, Akuntabilitas publik dan Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap interaksi antara interaksi antara kualitas dewan dengan pengawasan APBD, Transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif terhadap interaksi antara kualitas dewan dengan pengawasan APBD
5.	Filda/2013	Fungsi pengawasan DPRD, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Good Government Governanc Akuntabilitass, Partisipasi masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik.	Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kusioner kepada anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang berjumlah 45 orang.	Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan uji residual.	Fungsi pengawasan DPRD berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, fungsi pengawasan DPRD tidak berpengaruh terhadap transparansi kebijakan publik, pengetahuan tentang anggaran memoderasi hubungan antara fungsi pengawasan DPRD dengan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, sedangkan pada transparansi kebijakan publik, pengetahuan anggaran tidak

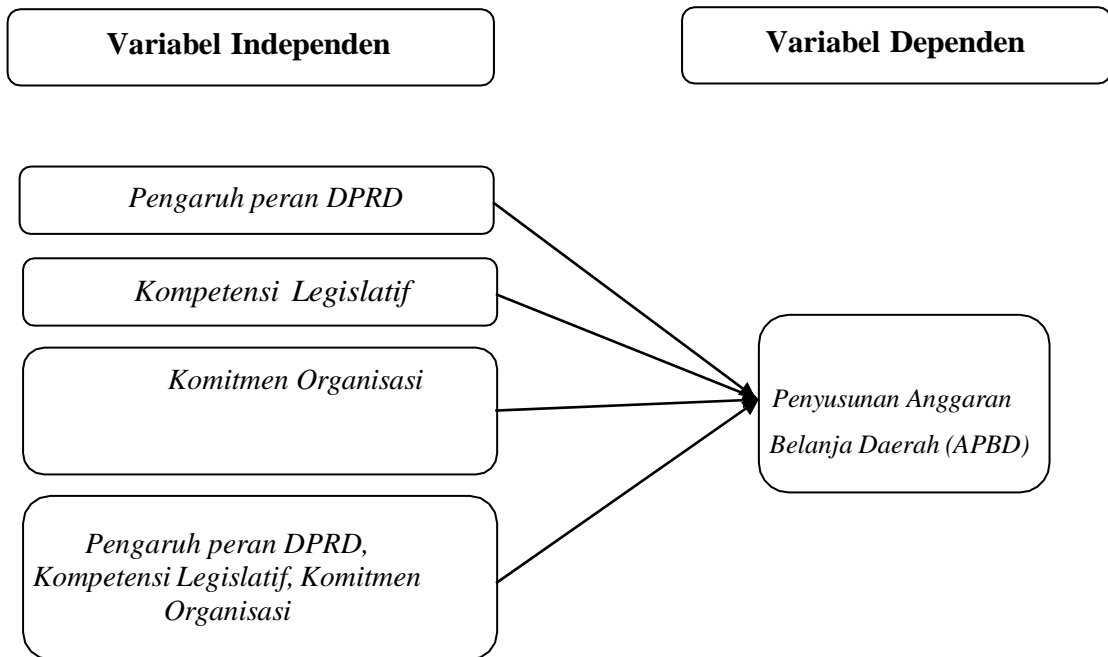
Pengetahuan penganggaran dengan peran DPRD dalam penyusunan APBD yaitu komitmen organisasi. berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Filda

(2013), Mayasari (2012), Widyaningsih (2012) dan Indriani (2002), sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Sumatera Utara yang berjumlah 100 orang.

2.3 Kerangka Berpikir Konseptual

Penelitian ini meneliti pengaruh peranan anggota dprd, kompetensi legislatif, komitmen organisasi, dan pengetahuan anggaran terhadap penyusunan APBD studi kasus pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan landasan teori diatas dapat disusun kerangka pemikiran teoritis dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai berikut:

Gambar 3.1
Pengaruh Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kompetensi Legislatif, Dan
Komitmen Organisasi Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD)



2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang belum tentu benar maupun salah, oleh karena itu dugaan sementara tersebut harus diuji dahulu kebenarannya. Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Berdasarkan kajian teori di atas, maka dalam penelitian ini hipotesis yang akan diuji kebenarannya adalah:

1. Pengaruh Peranan DPRD terhadap penyusunan APBD
2. Pengaruh Kompetensi Legislatif terhadap penyusunan APBD.
3. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap penyusunan APBD.
4. Pengaruh Penyusunan Anggaran terhadap Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

BAB 3

METODE PENELITIAN.

3.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Menurut Sugiyono (2014:11), penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dan seberapa eratnya pengaruh atau hubungan itu. Penelitian ini untuk melihat pengaruh peranan anggota DPRD, kompetensi legislatif, dan komitmen organisasi terhadap penyusunan anggaran pemerintah belanja daerah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode survey dari suatu populasi dengan mengandalkan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Peneliti menggunakan desain ini untuk mengetahui apakah peranan anggota DPRD, kompetensi legislatif, dan komitmen organisasi sebagai variabel independen memiliki pengaruh terhadap penyusunan APBD. Selain itu juga peneliti menggunakan teknik *Probability sampling*.

Asosiatif, yaitu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih, Sugiyono (2013: 57). Hubungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal. Hubungan kasual adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, yang terdiri dari variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (variabel yang dipengaruhi) menurut Sugiyono (2013: 59).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh peran DPRD kompetensi legislatif, dan komitmen organisasi terhadap penyusunan anggaran

pendapatan dan belanja daerah Sumatera Utara baik secara simultan maupun parsial. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap peningkatan penyusunan APBD pada Sumatera Utara, dan juga memberikan kontribusi referensi, baik kepada peneliti maupun para akademisi tentang penyusunan anggaran daerah. Penelitian ini dimulai dengan membahas kajian pustaka mengenai anggaran daerah, peran DPRD, kompetensi legislatif, dan komitmen organisasi; dilanjutkan dengan metodologi yang digunakan dalam penelitian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditujukan pada Para Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. Penelitian dilaksanakan di Jl. Imam Bonjol No 5 Medan Petisah. Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari persiapan hingga sampai akhir dimana dengan adanya sesi wawancara dan pengisian angket kuisioner sejak di awal Juni hingga pelaksanaan sampai dengan Agustus 2022.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Proses Penelitian	Waktu (Bulan) Tahun 2022							
		Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep
1	Penelitian Pendahuluan	■							
2	Penyusunan Proposal	■	■	■	■				
3	Pembimbingan Proposal	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Seminar Proposal					■	■		
5	Penyempurnaan Proposal					■	■	■	
6	Pengolahan Analisis Data						■	■	■
7	Penyusunan Skripsi						■	■	■
8	Pembimbingan Skripsi						■	■	■
9	Sidang Meja Hijau								■
10	Penyempurnaan Skripsi dan Penulisan Jurnal								■

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Adapun tahap pengambilan sampelnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah dapat menggunakan teknik pengambilan sampel *Probability sampling*. Teknik *probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang paling umum untuk studi opini publik, polling pemilu, dan studi lain yang hasilnya akan diterapkan pada populasi yang lebih luas. Oleh sebab itu, dalam hal ini harus memberi keterangan bahwa metode penelitian yang dilakukan harus mewakili populasi yang lebih luas.

3.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian bsik terdiri dari benda yang nyata, abstrak, peristiwa maupun gejala yang merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama. Populasi ini ditujukan pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara. Adapun jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini, bahwa jumlah pengamatan (ukuran sampel) paling sedikit digunakan harus empat kali jumlah instrumen.

Berdasarkan pendapat Maholtra (2006:291), instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah $20 \times 5 = 100$. Karena berdasarkan pernyataan tersebut dan karena ada keterbatasan waktu, dan tenaga, penulis penulis mengambil sampel untuk penelitian ini sebanyak 100 responden.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Interview yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan responden dengan bantuan daftar pertanyaan untuk mengumpulkan data primer.
2. Kuisisioner yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis pada responden untuk menjawab.
3. Dokumentasi yaitu data yang dikumpulkan dengan melihat dokumen atau catatan yang relevan dengan masalah. Dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat brosur serta dokumen-dokumen untuk memperoleh landasan teori.

3.4 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberi arti, atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu Variabel Dependen (penyusunan APBD), Variabel Independent (peran DPRD, kompetensi eksekutif, dan komitmen organisasi). Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Y) merupakan kegiatan merencanakan anggaran tahunan pemerintah daerah dalam

masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006). Penyusunan APBD dapat diukur dengan menggunakan indikator kesesuaian terhadap peraturan dan ketepatan waktu.

1.1.1 Variable Bebas (*Independent Variable*)

Variable bebas merupakan variable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable terikat. (Sugiyono, 2011:33).

1.1.2 Variable Terikat (*Dependent Variable*)

Variable terikat merupakan variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variable bebas.

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Y)	Merupakan kegiatan merencanakan anggaran tahunan pemerintah daerah dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 januari sd 31 desember (Permendagri) nomor 13 tahun 2006.	1. Kesesuaian terhadap peraturan, dan 2. Ketepatan waktu.	Skala Likert
2.	Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (X1)	Memiliki wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan perda tentang APBD dan berhak untuk mengajukan usulan perubahan RAPBD berdasarkan kebutuhan yang menunjukkan keberpihakan DPRD terhadap rakyat (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010).	1. Pembahasan anggaran, 2. Memberikan persetujuan terhadap anggaran, dan 3. Mengajukan usulan perubahan anggaran.	Skala Likert

3.	Kompetensi Legislatif (X2)	Merupakan karakteristik yang mendasar berupa keahlian, ketrampilan, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki seorang legislatif yang dapat berpengaruh langsung terhadap penyusunan APBD (McClelland, 1973).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan memahami peraturan, 2. pengetahuan terhadap penyusunan anggaran, 3. pendidikan dan pelatihan yang diikuti, dan 4. kemampuan dalam pengambilan keputusan 	Skala Likert
4.	Komitmen Organisasi (X3)	Merupakan perasaan kuat dalam diri seseorang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bentuk kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak di dalam organisasi dalam mewujudkan visi, misi, sasaran, dan tujuan dari organisasi (Luthans, 2006:249).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepedulian terhadap organisasi, 2. kemauan kuat untuk bekerja, 3. Keterlibatan dalam penyusunan APBD, dan 4. tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan 	Skala Likert

3.3 Instrumen Penelitian

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab, Sugiyono (2013:199).

Jawaban responden bersifat kualitatif yang kemudian akan di kuantitatifkan dengan menggunakan skala Likert yaitu, digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, Sugiyono (2013:134). Jawaban atas item pertanyaan memiliki gradasi dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju dengan skor 1 hingga 5.

Tabel 3.3
Jawaban responden

No	Skala	Skor
1	Sangat setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang setuju (KS)	3
4	Tidak setuju (TS)	2
5	Sangat tidak setuju (TS)	1

3.4 Uji Instrumen

Sebelum melakukan pengambilan data melalui angket (kuesioner), maka terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan realibilitas terhadap daftar pertanyaan yang digunakan.

3.4.1 Uji Validitas

Menurut (Juliandi, 2013: 79), uji validitas yakni dengan cara menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun sebelumnya dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Validitas suatu angket akan menggambarkan tingkat kemampuan alat ukur yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran. Untuk menguji validitas instrumen penelitian peneliti menggunakan alat uji statistik SPSS 25 Untuk mengetahui adanya hubungan yang tinggi atau rendah antara kedua variabel berdasarkan nilai r (koefisien korelasi), dapat dilihat melalui kriteria pengujian validitas sebagai berikut:

- a) Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ (pada taraf signifikansi 5%), maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut valid.
- b) Apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ (pada taraf signifikansi 5%), maka dapat

dikatakan item kuesioner tersebut tidak valid.

- c) Dengan demikian, permasalahan validitas instrumen kuesioner (angket) yang menunjukkan mampu tidaknya angket tersebut untuk mengukur objek apa yang diukur, maka disebut valid. Sebaliknya, apabila tidak mampu untuk mengukur apa yang akan diukur maka dinyatakan tidak valid.

Uji validitas dilakukan kepada anggota DPRD Sumatera utara untuk mendapatkan data yang terukur adapaun data yang di uji coba kan adalah berupa angket. Berikut data di jelaskan di bawah ini :

Tabel 3.4
Uji Validitas

No	Variabel	Angket	Rhitung	Rtabel	Keterangan
1	Peran Dewan	PDPRD 1	.593**	,361	Valid
		PDPRD 2	.566**		Valid
	Perwakilan Rakyat Daerah (X ₁)	PDPRD 3	.573**		Valid
		PDPRD 4	.554**		Valid
		PDPRD 5	.700**		Valid
2	Kompetensi Legislatif (X ₂)	KL 1	.718**	,361	Valid
		KL 2	.637**		Valid
	KL 3	.775**	Valid		
	KL 4	.564	Valid		
	KL 5	.729**	Valid		
3	Komitmen Organisasi (X ₃)	KO 1	.650**	,361	Valid
		KO 2	.698**		Valid
	KO 3	.640**	Valid		
	KO 4	.754**	Valid		
	KO 5	.855**	Valid		
4	Penyusunan Anggaran	PAPBD 1	.712**	,361	Valid
		PDPRD 2	.855**		Valid
	Pendapatan Belanja Daerah APBD (Y)	PDPRD 3	.488**		Valid
		PDPRD 4	.829**		Valid
		PDPRD 5	.481**		Valid

Sumber: Olah data SPSS 25

3.4.2 Uji Reliabilitas

Menurut (Juliandi, 2013: 83) tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk melihat apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya. Uji reliabilitas digunakan untuk melihat apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya, serta dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok instrumen ganjil dan kelompok instrumen genap. Untuk menguji reliabilitas, peneliti menggunakan alat uji statistik SPSS 25 dengan kriteria; jika nilai koefisien reliabilitas $> r_{hitung}$ maka, instrumen dapat dipercaya. Sebaliknya, jika nilai koefisien reliabilitas $< r_{hitung}$ maka, instrumen tidak dapat dipercaya.

Setelah dilakukan uji validitas selanjutnya dilakukan uji realibitas untuk mengetahui konsistensi angket yang telah valid tersebut yang diukur menggunakan *cronbach alpha* menggunakan spss versi 25 dibawah ini :

Tabel 3.5
Uji Reliabilitas

No	Variabel	cronbach's alpha	N of Items	Rtabel	Keterangan
1	Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (X ₁)	0,554	5	,361	Reliabel
2	Kompetensi Legislatif (X ₂)	0,732	5	,361	Reliabel
3	Komitmen Organisasi (X ₃)	0,768	5	,361	Reliabel
4	Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD (Y)	0,706	5	,361	Reliabel

3.5 Teknik Analisis Data

Agar memperkuat akurasi terhadap teknik analisis yang digunakan, maka dilakukan uji asumsi klasik. Untuk menguji penyimpangan asumsi klasik dilakukan pengujian, sebagai berikut.

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang diperoleh baik atau tidak. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji linearitas, dan uji multikolinearitas.

3.5.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel bebas, variabel terikat, maupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Salah satu cara untuk mengetahui normalitas suatu data adalah dengan melihat grafik P-plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal dan plotting data akan di bandingkan dengan garis diagonalnya. Jika berdistribusi normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Uji normalitas akan dianalisis dengan menggunakan program aplikasi SPSS.

3.5.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolinearitas dapat diuji

melalui nilai toleransi dengan *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah apabila nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Jika nilai *Tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel. Jika nilai *Tolerance* < 0,1 dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel.

3.5.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara ketiga variabel bebas Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kompetensi Legislatif, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maka dapat digunakan rumus analisis regresi linear berganda yang dikemukakan oleh Arikunto (2013:344) , sebagai berikut.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- β_0 = Nilai konstanta
- β_1 = Koefisien Nilai X_1
- β_2 = Koefisien Nilai X_2
- β_3 = Koefisien Nilai X_3

3.6.3 Uji Hipotesis

3.6.3.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial (masing-masing) mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Uji parsial digunakan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} sehingga disebut dengan uji t.

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikansi 95% atau $\alpha = 0,05$ maka

hipotesis diterima yang berarti variabel independent (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependent (Y), sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis tersebut ditolak. Berikut rumus penghitungannya:

$$t_{hitung} = \frac{b_i - \beta_i}{S_{b_i}}$$

Keterangan:

b_i = Koefisien regresi variabel
 β_i = Koefisien beta
 S = Standar error

3.7.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat.

Hasil dari F_{hitung} yang diperoleh dibandingkan dengan F_{tabel} pada taraf signifikan 95% atau $\alpha = 0,05$. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka disimpulkan bahwa variabel bebas secara bersamaan mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka variabel bebas yang diuji tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Berikut rumus uji F yang digunakan:

$$F_h = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

F_h = Nilai F yang dihitung
 R = Koefisien determinasi
 k = Jumlah variabel bebas
 n = Jumlah sampel

3.7.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2013:97), “Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen”. Maka, uji koefisien determinasi adalah uji ketepatan perkiraan yang dipakai untuk melihat proporsi dependen atau persentase dari total variasi variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah 0-1 ($0 < R^2 < 1$), dengan kriteria sebagai berikut.

1. Jika R^2 mendekati 0, maka variabel independen dan variabel dependen tidak ada keterkaitan.
2. Jika R^2 mendekati 1, maka variabel independen dan variabel dependen ada keterkaitan.

Untuk mengetahui kontribusi variabel x terhadap Y digunakan rumus koefisien determinan berikut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian Penelitian

Penelitian ini di laksanakan pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditunjukan pada Para Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. Penelitian dilaksanakan di Jl. Imam Bonjol No 5 Medan Petisah. Sumatera Utara. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah ada pengaruh peran dewan perwakilan rakyat daerah, kompetensi legislatif, dan komitmen organisasi terhadap penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Sumatera Utara. Adapaun metode penelitian adalah menggunakan penelitian ex post facto yaitu Perubahan variabel bebas itu telah terjadi dan peneliti dihadapkan kepada masalah bagaimana menetapkan sebab dari akibat yang sedang diamati. Adapun populasi penelitian adalah seluruh anggota DPRD berjumlah 100 orang dengan berbagai kadar dan Partai. Sedangkan Sampel penelitian adalah 73 orang dengan tehnik total sampling. penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan angket tentang penelitian yang di susun oleh peneliti mengenai peran dewan perwakilan rakyat daerah, kompetensi legislatif, dan komitmen organisasi terhadap penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DPRD Sumatera Utara. Namun sebelum melakukan penelitian peneliti terlebih dahulu melakukan uji instrumen di bawah ini.

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

4.2.1 Deskripsi Demografi Penelitian

Penelitian ini mengambil sampel para anggota dewan yang ada di Badan Anggaran, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2024 sebanyak 100 orang. Adapun kuesioner yang dibagikan sebanyak 19 angket dari ke empat variabel .kepada 100 responden pengumpulan data di lakukan dengan bantuan *Google Form*. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Pengembalian Kuisisioner Penelitian

No	Keterangan	Jumlah Kuisisioner	Persentase
1	Kuisisioner yang di sebar	100	100%
2	Kuisisioner kembali	73	73%
3	Kuesioner yang tidak kembali	27	27%
4	Kuesioner yang dapat diolah	73	73%
N sampel = 73			
Responden Rate $100/73 \cdot 100\% = 73\%$			

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa dari 100 responden yang di sebar oleh peneliti yang bersedia menjawab hanya 73 Anggota saja, sehingga peneliti memutuskan memakai 73 sebagai sampel penelitian di penelitian ini adapun deskriptif Karakteristik responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
Data Deografi Penelitian

No	Keterangan	Frekuensi	Persentasi
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	67 92%
		Perempuan	6 8%
	Total	73	100%
2	Usia	21-30 Tahun	10 14%
		31-40 Tahun	14 19%
		41-50 Tahun	26 36%
		51-60 Tahun	20 27%
		61-70 Tahun	2 3%
		> 71 Tahun	1 1%
		Total	73
3	Jenjang Pendidikan	S1 (Sarjana)	11 15%
		S2 (Master)	45 62%
		S3 (Doktor)	16 22%
		Total	73
4	Bidang Pendidikan	Ekonomi dan Bisnis	20 27%
		Hukum	17 23%
		Kesehatan	2 3%
		Sosial dan Politik	3 4%
		Pendidikan	1 2%
		Agama	3 4%
		Teknik	12 16%
		Lain-lain	15 21%
Total	73	100%	
5	Asal Fraksi	PDI Perjuangan	15 21%
		Gerindra	10 14%
		Golkar	9 12%
		Nasdem	9 12%
		Partai Keadilan Sejahtera	8 11%
		Demokrat	9 12%
		Partai Amanat Nasional	5 6%
		Hanura	5 7%
		Partai Nusantara	3 3%
		Total	73

4.3.2 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini diukur menggunakan angket yang telah diuji instrumen, setelah data valid dan reabel peneliti selanjutnya melakukan penelitian adapun data dari penelitian dapat dilihat pada tabel berikut dengan variabel yang berbeda. Untuk melihat kategori angket dapat dilihat melalui skala nilai pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Skala Nilai

Interval	Kategori
4,21 - 5,00	Sangat Baik
3,41 - 4,20	Baik
2,61 - 3,40	Cukup Baik
1,81 - 2,60	Kurang Baik
1,00 - 1,80	Tidak Baik

Sumber : Sudjana 2014 :149

Setelah penelitian dilakukan, dengan jumlah responden sebanyak 73 dengan, 20 pernyataan di semua variabel dengan 5 item jawaban yang dapat dilihat pada distribusi frekuensi berikut.

4.3.2.1 Deskripsi Variabel Peran DPRD

Berikut deskripsi data penelitian variabel peran DPRD pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi variabel

No.	Alternatif Jawaban										Skor
	SS		S		KS		TS		STS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	20	27%	47	64%	6	8%	0	0%	0	0	83.80%
2	10	14%	35	48%	27	37%	1	1%	0	0	74.80%
3	16	22%	34	47%	23	32%	0	0%	0	0	78.00%
4	18	25%	29	40%	25	34%	1	1%	0	0	77.60%
5	16	22%	36	49%	20	27%	1	1%	0	0	78.40%
Rata-rata											78.60%

Berdasarkan tabel 4.3 distribusi frekuensi jawaban diperoleh interpretasi data masing-masing angket bahwa nilai rata-rata 76.60 % dengan kategori “Baik”.

4.3.2.2 Deskripsi Variabel Kompetensi Legislatif

Berikut deskripsi data penelitian variabel Kompetensi Legislatif pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi variabel Kompetensi Legislatif

Alternatif Jawaban											
No.	SS		S		KS		TS		STS		Skor
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F
1	31	42%	47	64%	6	8%	0	0%	0	0%	99%
2	19	26%	35	48%	27	37%	1	1%	0	0%	87%
3	27	37%	34	47%	23	32%	0	0%	0	0%	93%
4	16	22%	29	40%	25	34%	1	1%	0	0%	75%
5	28	38%	36	49%	20	27%	1	1%	0	0%	95%
Rata-rata											89.8%

Berdasarkan tabel 4.3 distribusi frekuensi jawaban diperoleh interpretasi data masing-masing angket bahwa nilai rata-rata 89.9 % dengan kategori “Sangat Baik”.

4.3.2.3 Deskripsi Variabel Komitmen Organisasi

Berikut deskripsi data penelitian variabel Komitmen Organisasi pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi variabel Komitmen Organisasi

Alternatif Jawaban											
No.	SS		S		KS		TS		STS		Skor
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F
1	30	41%	40	55%	3	4%	0	0%	0	0%	87.40%
2	13	18%	31	42%	26	36%	3	4%	0	0%	74.80%
3	16	22%	36	49%	21	29%	0	0%	0	0%	78.60%
4	17	23%	39	53%	17	23%	0	0%	0	0%	80.00%
5	19	26%	31	42%	22	30%	1	1%	0	0%	78.60%
Rata-rata											79.80%

Berdasarkan tabel 4.6 distribusi frekuensi jawaban diperoleh interpretasi data masing-masing angket bahwa nilai rata-rata 79.80 % dengan kategori “Baik”.

4.3.2.4 Deskripsi Variabel Penyusunan APBD

Berikut deskripsi data penelitian variabel Penyusunan APBD pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi variabel Penyusunan APBD

No.	Alternatif Jawaban										Skor
	SS		S		KS		TS		STS		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	50	68%	22	30%	1	1%	0	0%	0	0%	93%
2	28	38%	22	30%	19	26%	4	5%	0	0%	80%
3	36	49%	34	47%	3	4%	0	0%	0	0%	89%
4	31	42%	28	38%	12	16%	2	3%	0	0%	84%
5	21	29%	37	51%	14	19%	1	1%	0	0%	81%
Rata-rata											86%

Berdasarkan tabel 4.8 distribusi frekuensi jawaban diperoleh interpretasi data masing-masing angket bahwa nilai rata-rata 86 % dengan kategori “Sangat Baik”.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Untuk memastikan apakah data dan model yang dipakai berdistribusi normal atau tidak bisa dilakukan uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* terhadap tiap variabel penelitian. Dalam melakukan uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* inidapat di bantu dengan alat analisis berupa program *SPSS 25*.

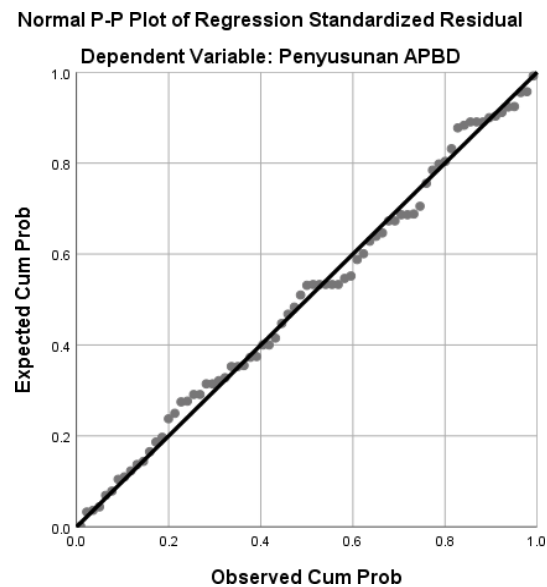
Suatu data tersebar normal atau tidak normal ditinjau menurut nilai sig. apabila nilai sig > 0,05 maka data variabel penelitian berdistribusi normal. Hasil uji normalitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
	N	73
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.94039103
Most Extreme Differences	Absolute Positive	0.061
	Negative	-0.061
	Test Statistic	0.061
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

besarnya nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Berdasarkan ketentuan jika $\text{Sig} = >0,05$ yaitu $0,200 > 0,05$ maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Uji kedua yang dapat digunakan untuk mengetahui data berdistribusi normal adalah dengan Normal P-Plot of Regression berikut dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.1 Normal P-Plot of Regression

Dari gambar di atas menunjukkan titik-titik tersebar sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, disimpulkan bahwa data yang didapat tersebar/berdistribusi normal.

4.3.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi ada hubungan antar variabel bebas pada penelitian. Model regresi yang baik ketika tidak terjadi korelasi antar variabel bebas yaitu saat *Tolerance* > dari 0,1 dan *VIF* < dari 0. Menurut output pengujian dengan *SPSS 25*, didapat hasil berikut:

Tabel 4.9
Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a		Keterangan
	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Peran DPRD	0.686	1.457	Tidak ada gejala Multikolinieritas
Kompetensi Legislatif	0.730	1.369	Tidak ada gejala Multikolinieritas
Komitmen Organisasi	0.739	1.353	Tidak ada gejala Multikolinieritas

a. Dependent Variable: Penyusunan APBD

Sumber: Olah data SPSS 25

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ketiga variabel tidak memiliki gejala Multikolinieritas karena nilai *Tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10. Sehingga data layak untuk di lanjutkan.

4.3.4 Uji Heteroskedasitas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain di dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji glejser. Kriteria yang digunakan adalah apabila nilai signifikansi > 0,05, maka terbebas dari asumsi heteroskedastisitas. Menurut output pengujian dengan *SPSS 25*, didapat hasil berikut:

Tabel 4.10
Uji Heteroskedastisitas

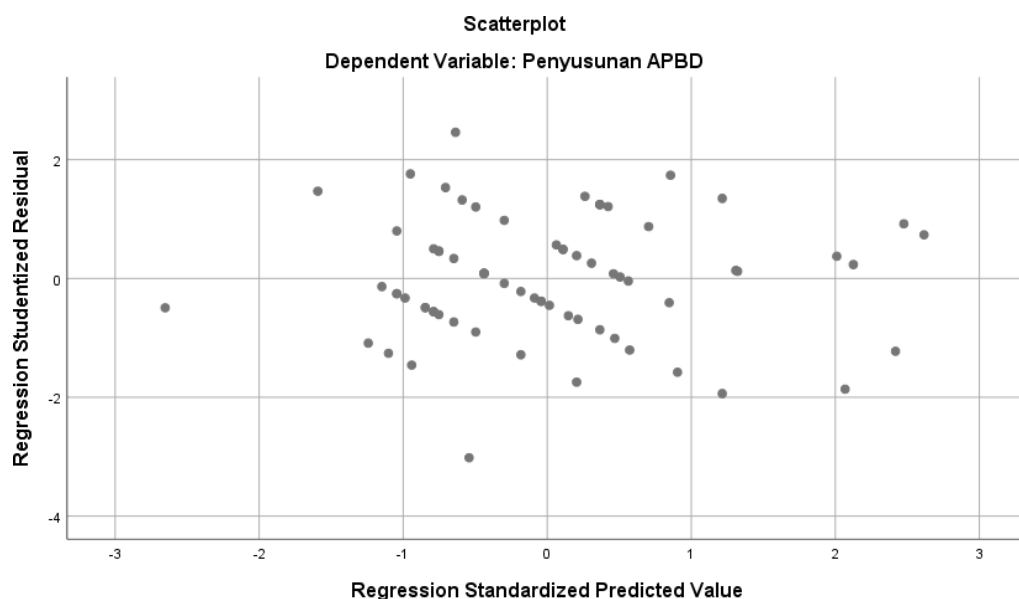
	Coefficients ^a		Keterangan
	t	Sig	
	(Constant)	0.232	
1 Peran DPRD	0.367	0.715	Tidak ada gejala Hetero
Kompetensi Legislatif	-0.214	0.831	Tidak ada gejala Hetero
Komitmen Organisasi	0.278	0.782	Tidak ada gejala Hetero

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Olah data SPSS 25

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Glejser diperoleh nilai signifikansi untuk variabel Peran DPRD (X_1) adalah $0,091 >$ dari $0,05$ dan nilai signifikansi variabel Kompetensi Legislatif (X_2) adalah $0,795 >$ dari $0,05$. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Uji Heteroskedastisitas juga dapat menggunakan uji Scatter Plot yaitu pada gambar dibawah :

Gambar 4.2
Uji Scatterplot



Sumber: Hasil pengolahan data program SPSS 25

Berdasarkan grafik diatas, terlihat titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan dalam melihat pengaruh antar variabel bebas dengan satu variabel terikat. Model analisis ini juga dilakukan untuk mengetahui seberapa besar Peran dewan perwakilan rakyat daerah, kompetensi legislatif, dan komitmen organisasi terhadap penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DPRD Sumatera Utara. Menurut perhitungan didapat hasil regresi linear berganda melalui alat analisis program *SPSS 25*, sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.220	1.866		2.262	0.027
Peran DPRD	0.392	0.079	0.463	4.952	0.000
Kompetensi Legislatif	0.221	0.093	0.215	2.369	0.021
Komitmen Organisasi	0.286	0.097	0.265	2.938	0.004

a. Dependent Variable: Penyusunan APBD

Sumber: Olahan Data SPSS 25

Berdasarkan olahan data di atas, maka model persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

berdasarkan uji yang dilakukan disps pada tabel 4.15 dapat dimasukkan persamaan sebagai berikut :

$$Y = 4,220 + 0,392 X_1 + 0,221 X_2 + 0,286 X_3 + e$$

1. Nilai Konstanta (a)

Pada persamaan diatas nilai konstanta diperoleh sebesar 4,220 dapat diartikan bahwa Penyusunan APBD (Y) tanpa dipengaruhi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (X_1) Kompetensi Legislatif (X_2), dan Komitmen Organisasi (X_3) maka Penyusunan APBD sebesar 4,220.

2. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (X_1)

Untuk variabel Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (X_1) diperoleh nilai 0,392 menyatakan bahwa jika variabel Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengalami kenaikan sebesar satu satuan akan meningkatkan Penyusunan APBD sebesar 0,392 dengan (asumsi faktor lain konstan/tetap).

3. Kompetensi Legislatif (X_2)

Untuk variabel Kompetensi Legislatif (X_2) diperoleh nilai 0,221 menyatakan bahwa jika variabel Kompetensi Legislatif mengalami kenaikan sebesar satu satuan akan meningkatkan Penyusunan APBD sebesar 0,221 dengan (asumsi faktor lain konstan/tetap).

4. Komitmen organisasi (X_3)

Untuk variabel Komitmen organisasi (X_3) diperoleh nilai 0,286 menyatakan bahwa jika variabel Kompetensi Legislatif mengalami kenaikan sebesar satu satuan akan meningkatkan Penyusunan APBD sebesar 0,286 dengan (asumsi faktor lain konstan/tetap).

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji hipotesis secara parsial (uji-t) dilakukan untuk melihat pengaruh Peran DPRD (X_1) Kompetensi Legislatif (X_2) Komitmen organisasi (X_3) terhadap penyusunan APBD secara parsial. Dengan kriteria jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan taraf sig $< 0,05$ maka hipotesis diterima, dan sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan taraf sig $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Untuk mencari nilai t_{tabel} digunakan rumus $df = n - k$ dimana $n = 100$ dan $k = 3$, sehingga $df = 100 - 3 = 97$ pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$. Dari perhitungan ini maka t_{tabel} sebesar 1,660. Adapun hasil analisis uji t dengan program SPSS 25 diperoleh hasil pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.220	1.866		2.262	0.027
	Peran DPRD	0.392	0.079	0.463	4.952	0.000
	Kompetensi Legislatif	0.221	0.093	0.215	2.369	0.021
	Komitmen Organisasi	0.286	0.097	0.265	2.938	0.004

a. Dependent Variable: Penyusunan APBD

Sumber: Hasil pengolahan data program SPSS 25

Berdasarkan output yang diperoleh di atas, dapat dilihat bahwa

1. hasil uji t untuk variabel peran DPRD (X_1) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 4,952 dan nilai signifikansi 0,000. Dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,952 > 1,660$) dan nilai sig dengan taraf $\alpha = 5\%$ adalah $0,000 < 0,05$. Sehingga menurut kriteria uji hipotesis secara parsial, hipotesis pertama

diterima yang berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Peran DPRD terhadap penyusunan APBD pada DPRD Sumatera Utara.

2. Untuk variabel Kompetensi legislatif menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,369 dan nilai sig 0,021. Dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,369 > 1,660$) dan nilai signifikansi pada taraf $\alpha = 5\%$ adalah $0,021 < 0,05$. Sehingga menurut kriteria uji hipotesis secara parsial kalau hipotesis kedua diterima sehingga ada pengaruh positif dan sig Kompetensi legislatif terhadap penyusunan APBD pada DPRD Sumatera Utara.
3. Sedangkan untuk variabel Kompetensi organisasi menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,938 dan nilai sig 0,021. Dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,938 > 1,660$) dan nilai signifikansi pada taraf $\alpha = 5\%$ adalah $0,004 < 0,05$. Sehingga menurut kriteria uji hipotesis secara parsial kalau hipotesis kedua diterima sehingga ada pengaruh positif dan sig Kompetensi legislatif terhadap penyusunan APBD pada DPRD Sumatera Utara.

4.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji hipotesis secara simultan (uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah melihat pengaruh Peran DPRD (X_1) Kompetensi Legislatif (X_2) Komitmen organisasi (X_3) terhadap penyusunan APBD secara simultan. Uji ini digunakan untuk membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} pada ketentuan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai sig $< 0,05$ maka hipotesis diterima dan sebaliknya jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai sig $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Untuk mencari F_{tabel} digunakan rumus df (1) dan df (2) dengan ketentuan $df (1) = K - 1$ dan $df (2) = n$

– K, sehingga $df(1) = 2$ dan $df(2) = 100 - 3 = 97$. Dari perhitungan ini maka dapat diketahui F_{tabel} dalam penelitian ini adalah sebesar 3,09. Adapun hasil analisis uji F dengan program *SPSS 25.0* diperoleh hasil pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	89.999	3	30.000	32.510	.000 ^b
Residual	63.672	69	0.923		
Total	153.671	72			

a. Dependent Variable: Penyusunan APBD
b. Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi, Kompetensi Legislatif, Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sumber: Hasil pengolahan data program SPSS 25

Berdasarkan hasil yang diperoleh di atas diketahui bahwa hasil uji F menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 32,510 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian, artinya $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($32,510 > 3,09$) dan nilai signifikansi pada taraf $\alpha = 5\%$ adalah $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa hipotesis ketiga diterima, sehingga disimpulkan terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kompetensi Legislatif terhadap Penyusunan APBD.

4.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dipakai dalam melihat kontribusi variabel Peran DPRD Kompetensi Legislatif Komitmen organisasi terhadap penyusunan APBD adapun perhitungannya adalah di bawah ini :

Tabel 4.14
Hasil (R²)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.765 ^a	0.588	0.568	0.961

a. Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi, Kompetensi Legislatif, Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b. Dependent Variable: Penyusunan APBD

Dari *output tersebut*, didapat nilai Adjusted R Square sebesar 0.588 atau sebesar 58,8 %. Dengan demikian berarti menunjukkan bahwa Peran DPRD, Komitmen Organisasi, Kompetensi Legislatif, kontribusi terhadap Penyusunan APBD sebesar 58,8 %, sedangkan sisanya yaitu sebesar 41,2 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diulas pada riset ini.

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

4.6.1 Peran DPRD terhadap Penyusunan APBD pada DPRD Sumatera Utara

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti analisis data untuk menguji hipotesis pertama dengan uji t menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 4.802 dan nilai signifikansi 0,000. Dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4.802 > 1,660$) dan nilai sig taraf $\alpha = 5\%$ adalah $0,000 < 0,05$. Maka berdasarkan kriteria pengujian hipotesis secara parsial bahwa hipotesis pertama diterima yang berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Peran DPRD terhadap Penyusunan APBD.

Berdasarkan pengertian di atas dapat di implementasikan bahwa semakin

baik nya DPRD menjalankan peran dan tanggung jawabnya maka penusun APBD juga tentu semakin baik peran DPRD sendiri tentu sangat luas dari pengetahuan akan peran dan tanggung jawab jika anggota paham dan mengerti akan tugas nya tentu penyusunan APBD juga tentu semakin mudah, begitu juga sebaliknya jika anggota DPRD tidak paham akan peran nya sebagai anggota DPRD baik itu pemahaman, tugas, dan tanggung jawab tentu penyusunan APBD tentu akan tidak teratur atau berantakan sehingga bisa merusak kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2002), Sopanah (2003), Werimon et al (2007), Winarna dan Murni (2007), Coryanata (2007), Devi dan Andriyani (2010), Widyaningsih dan Pujirahayu (2012), dan Manginte et al (2015). Hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut membuktikan bahwa pengetahuan penganggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan APBD.

4.6.2 Pengaruh Kompetensi Legislatif Penyusunan APBD pada DPRD Sumatera Utara

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan analisis data untuk menguji hipotesis kedua dengan uji t menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,369 dan nilai signifikansi 0,021. Dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,369 > 1,660$) dan nilai signifikansi pada taraf $\alpha = 5\%$ adalah $0,021 < 0,05$. Maka berdasarkan kriteria pengujian hipotesis secara parsial bahwa hipotesis kedua diterima yang berarti ada pengaruh positif dan signifikan antara Pengaruh Kompetensi Legislatif Penyusunan APBD.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diimplementasikan bahwa semakin

baik kompetensi semakin baik kompetensi anggota DPRD mengenai kompetensi legislatif maka akan penyusunan APBD tentu akan terelisasi dengan baik hal itu tentu dapat di jelaskan jika anggota DPRD paham mengenai kondisi dan kekurangan bagi yang membutuhkan tentu dapat menjalankan tugas legislatif dengan baik hal itu tentu akan mempengaruhi penyusunan anggaran, begitu juga sebaliknya jika anggota DPRD tidak memiliki pengetahuan mengenai legislatif tentu dapat mempengaruhi penyusunan APBD hal itu tentu akan nyasar dari target karena kurangnya pemahaman tersebut.

4.6.3 Pengaruh Komitmen organisasi Penyusunan APBD pada DPRD Sumatera Utara

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan analisis data untuk menguji hipotesis kedua dengan uji t menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,938 dan nilai signifikansi 0,004. Dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,938 > 1,660$) dan nilai signifikansi pada taraf $\alpha = 5\%$ adalah $0,004 < 0,05$. Maka berdasarkan kriteria pengujian hipotesis secara parsial bahwa hipotesis kedua diterima yang berarti ada pengaruh positif dan signifikan antara Pengaruh Komitmen organisasi Penyusunan APBD.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat di implementasikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap penyusunan APBD hal itu dapat di jelaskan bahwa semakin komitmennya anggota akan organisasi penyusunan APBD akan semakin baik hal itu dapat di jelaskan karena di dalam organisasi tentu mendapatkan pembelajaran yang dapat meningkatkan pola pikir kritis, saran yang membangun dan masih banyak sehingga anggota DPRD tentu harus aktif

dalam berorganisasi baik dalam partai untuk berdiskusi akan masa depan warga yang telah memercaya anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Begitu juga sebaliknya jika anggota DPRD tidak memiliki komitmen dalam organisasi sendiri baik itu di Partai atau pun Kader masing-masing tentu akan mempengaruhi penyusunan APBD dalam penyusunan APBD tentu ada organisasi yang berdiskusi paling tidak dari partai masing-masing jika anggota saja sudah tidak berkomitmen tentu hasil dalam penyusunan APBD tersebut tidak lah efektif sehingga anggota DPRD harus komit agar penyusunan APBD dapat terealisasi dan masyarakat semakin percaya akan kinerja wakil rakyat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh Peran DPRD terhadap Penyusunan APBD pada DPRD Sumatera Utara.
2. Terdapat pengaruh Kompetensi Legislatif terhadap penyusunan APBD pada DPRD Sumatera Utara.
3. Terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap penyusunan APBD pada DPRD Sumatera Utara.
4. Terdapat pengaruh peran DPRD, Kompetensi legislative, dan komitmen organisasi terhadap penyusunan APBD pada DPRD Sumatera Utara secara bersama-sama.
5. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi (R^2) presentase peran DPRD, Kompetensi legislative, dan komitmen oraganisasi terhadap Penyusunan APBD sebesar 58,8 % sedangkan sisanya 41,2 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran

1. Untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara agar lebih meningkatkan kinerjanya dan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai anggaran sehingga pengambilan keputusan tidak salah dan diharapkan faktor-faktor

yang mempengaruhi kinerja anggota dewan dalam pelaksanaan pengawasan APBD bisa segera ditindak lanjuti agar kedepannya hal tersebut tidak menjadi penghalang Anggota DPRD dalam melaksanakan pengawasan. Selain itu, lebih aktif melakukan peninjauan di lapangan agar pelaksanaan APBD terealisasi dan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara agar leUntuk Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara disarankan agar memberikan laporan tahunan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban anggaran kepada DPRD tepat waktu agar para anggota dewan bisa melaksanakan fungsi pengawasan dan pengkajian terhadap realisasi APBD dengan lebih efektif dan efisien.
3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian di beberapa tempat dengan memilih anggota DPRD yang khususnya membidangi anggaran saja dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara pada anggota dewan sehingga dewan dapat merespon pertanyaan peneliti sesuai kemampuan yang dimiliki serta dapat menambahkan variabel lainnya seperti partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, budaya organisasi, dan lain sebagainya yang diduga dapat mempengaruhi pengawasan realisasi APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafiz, M., & Nasution, J. (2022). Analisis Pengetahuan Anggota Dewan Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara Mengenai Efektivitas Anggaran Yang Di Keluarkan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(D), 8632–8639.
- Rivai dan Sagala, 2009:298. *Penganggaran Perusahaan* (Edisi 3). Banjarmasin: Salemba Empat.
- Nurhasmah, N., & Abdullah, S. (2015). Pengaruh Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd), Kompetensi Eksekutif, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Administrasi & Bisnis*, 4(1), 90–99.
- Nurmala Sari, E., & Lestari, S. (2018). Pengaruh Kompetensi dan Time Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 81–92.
- Polii, J., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Investigasi Pengetahuan Dan Pemahaman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tentang Penganggaran Berbasis Kinerja Di Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 30–39. H
- Saputra, W. A. (2019). Peran Anggota Dprd Perempuan Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(2), 14–24.
- Sinambela, E., & Pohan, A. K. R. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 16(1), 1689–1699.
- (Abdul Halim dan Syam Kusufi, 2012:104). "*Proses penyusunan anggaran sebagai variabel intervening*".
- Welsch, G. A., Hilton, R. W., & Gordon, P. N. (1996). *Anggaran* (Edisi Lima). Jakarta: Salemba Empat.
- (Abdullah dan Asmara, 2007). *Anggaran* (Edisi Pertama). Jakarta: Salemba Empat.
- Yuliana, Kristianti., & Hapsari. (2016). Perilaku DPRD Dalam Pelaksanaan Penyusunan APBD Pemerintahan Kota Salatiga. *Seminar Nasional Riset Manajemen & Bisnis 2016 "Pendekatan Keperilakuan Dalam Riset Manajemen & Bisnis,"* 1–6.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian

Kepada Yth. Responden Penelitian

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara

Dengan Hormat,

Saya yang Bertanda Tangan dibawah ini adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Nama	: Desy Fitri Sari
NIM	1805170313
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Jurusan	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka mencari data guna menyusun skripsi dengan judul “Pengaruh Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kompetensi Legislatif, dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyusunan Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) pada DPRD Sumatera Utara”, maka saya mohon bantuan serta kesediaannya Saudara/I untuk mengisi kuisisioner ini. Kuisisioner ini hanya bertujuan untuk kepentingan penelitian dan tidak disajikan ke pihak luar serta kerahasiaan dalam mengisi kuisisioner ini terjamin sepenuhnya. Oleh karena itu saya berharap jawaban yang saudara/i berikan dengan jujur dan terbuka akan sangat membantu dalam penelitian ini. Atas partisipasinya dan ketersediaan Saudara/i dalam mengisi kuisisioner ini saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya Peneliti

Desy Fitri Sari

**PENGARUH PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
KOMPETENSI LEGISLATIF, DAN KOMITMEN ORGANISASI
TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH (APBD) DPRD SUMATERA UTARA.**

KUISIONER PENELITIAN

Nama Responden :.....

Umur :.....Tahun

Jenis Kelamin: laki-laki Perempuan

Pendidikan Terakhir: SMA/SEDERAJAT D1 D2 D3

S1 S2 S3 Lain-Lain

Nama Partai :

Lama Bekerja: < 5 Tahun 5-10 Tahun >10 Tahun

Pada setiap item kuisisioner, tunjukkan seberapa jauh bapak/ibu sangat setuju terhadap pernyataan. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pemahaman dari Bapak/Ibu.

- | | | | |
|------------|----------------------|-----------|---------------|
| STS | =Sangat Tidak Setuju | S | =Setuju |
| TS | =Tidak Setuju | SS | =SangatSetuju |
| KS | =Kurang Setuju | | |

A. Pengetahuan Peran DPRD

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Saya memiliki pemahaman tentang penyusunan APBD berdasarkan peraturan terkait.					
2.	Apakah Bapak/Ibu selalu menangani setiap tugas dengan baik.					
3.	Saya mampu mengidentifikasi keterlambatan penyusunan APBD.					
4.	Saya aktif dalam mengajukan pertanyaan atau pernyataan pendapat yang berhubungan dengan pembahasan APBD.					
5.	Saya mengetahui kondisi yang dibenarkan untuk melakukan perubahan anggaran.					

A. Kompetensi Legislatif

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Apakah menurut bapak\ibu lembaga legislatif mempunyai fungsi umum dalam membuat perundang-undangan					
2.	Saya terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.					
3.	Dalam lembaga legislatif DPRD mempunyai peran yang sangat berpengaruh					
4.	Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah dikelola dalam APBD.					
5.	Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.					

B. Komitmen Organisasi

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Merasa bangga menjadi bagian didalam organisasi ini					
2.	Sadar bahwa komitmen adalah hal yang harus saya lakukan demi untuk menjalankan peran saya sebagai DPRD					
3.	Dalam lembaga legislatif DPRD mempunyai peran yang sangat berpengaruh					
4.	Berkeinginan menghabiskan sisa karir saya di organisasi ini dengan jenjang karir yang lebih baik lagi					
5.	Merasa masalah yang terjadi di organisasi menjadi permasalahan saya juga sebagai peran DPRD					

C. Penyusunan APBD

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban DPRD.					
2.	Saya mengetahui bahwa penyimpangan APBD sering terjadi karena pengelolaan anggaran tidak sesuai dengan norma dan prinsip anggaran.					
3.	Dalam lembaga legislatif DPRD mempunyai peran yang sangat berpengaruh					
4.	Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah dikelola dalam APBD.					
5.	Anggaran publik mendapatkan otorisasi legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.					

Lampiran 2 Tabulasi data uji coba instrumen

No	Responden	Peran DPRD (X ₁)						Kompetensi Legislatif (X ₂)						Komitmen organisasi (X ₃)						Penyusunan APBD (Y)					
		1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total
1	JK	5	5	4	3	2	19	5	5	3	5	3	21	5	4	3	4	3	19	5	3	4	3	3	18
2	LM	3	3	3	5	3	17	4	3	3	3	3	16	4	3	4	3	3	17	5	4	3	4	4	20
3	GH	5	4	4	3	4	20	4	3	3	5	4	19	3	5	4	3	3	18	5	5	4	5	3	22
4	YH	3	3	3	4	4	17	3	4	4	4	3	18	4	3	3	4	3	17	5	5	3	5	4	22
5	MU	3	5	3	3	4	18	3	3	3	5	3	17	3	5	4	3	3	18	5	5	3	5	4	22
6	NU	5	5	5	5	5	25	5	4	5	5	5	24	3	5	4	5	5	22	5	5	5	5	4	24
7	MB	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	4	21	4	4	5	4	4	21	5	5	4	5	4	23
8	RI	3	4	4	3	5	19	3	3	3	5	4	18	3	3	3	3	3	15	3	3	4	3	5	18
9	LH	4	4	4	5	5	22	4	4	5	5	5	23	4	4	4	5	3	20	4	3	5	3	3	18
10	YD	5	3	3	5	4	20	5	3	5	5	3	21	5	5	5	4	4	23	5	5	3	5	3	21
11	AT	5	4	4	5	5	23	5	4	5	5	4	23	4	5	4	5	4	22	5	4	4	4	3	20
12	BN	4	3	4	4	3	18	4	3	4	5	3	19	3	4	3	3	2	15	4	3	3	4	3	17
13	BM	3	3	5	4	4	19	3	3	4	4	3	17	2	3	3	2	2	12	4	3	3	3	3	16
14	BT	4	4	4	3	3	18	4	3	3	3	4	17	4	3	3	3	3	16	3	3	4	4	4	18
15	RQ	5	3	4	4	2	18	3	4	4	5	3	19	2	3	4	4	2	15	4	4	3	4	3	18
16	IU	5	5	4	5	4	23	4	4	5	4	5	22	5	5	4	5	4	23	5	5	4	5	4	23
17	QP	4	5	5	5	4	23	4	5	5	4	5	23	4	4	5	5	4	22	5	4	5	4	4	22
18	LO	4	4	5	4	4	21	4	4	5	5	4	22	3	4	5	4	4	20	5	5	4	5	5	24
19	MN	4	3	5	4	3	19	3	4	3	5	3	18	4	4	3	3	3	17	5	5	3	5	3	21

20	MJ	5	4	3	4	3	19	3	3	3	3	3	15	3	5	4	3	3	18	3	3	3	3	5	17
21	KL	3	4	4	3	4	18	3	3	3	5	4	18	4	3	4	3	3	17	3	4	4	4	5	20
22	NB	3	4	4	4	3	18	3	3	4	5	3	18	2	3	4	3	2	14	3	4	3	4	3	17
23	AS	3	3	5	4	3	18	3	4	4	5	3	19	2	3	4	4	2	15	4	3	5	3	4	19
24	AH	4	5	5	5	4	23	5	4	5	4	5	23	4	4	5	4	5	22	5	5	5	5	4	24
25	SB	3	4	3	4	2	16	3	4	4	5	3	19	3	3	4	4	3	17	3	3	3	3	2	14
26	PS	4	4	3	4	4	19	4	2	5	5	3	19	3	4	3	4	4	18	4	4	3	4	4	19
27	MA	4	4	4	4	4	20	5	4	5	5	4	23	4	4	5	4	5	22	4	5	4	5	4	22
28	ML	5	4	4	5	4	22	5	4	5	4	4	22	3	5	4	5	4	21	4	5	4	5	4	22
29	MH	3	4	3	4	2	16	3	4	4	5	3	19	4	3	3	4	3	17	4	3	3	3	3	16
30	GE	4	5	5	4	5	23	4	5	4	5	5	23	5	4	4	5	3	21	5	4	5	4	5	23

Lampiran 3 Uji Validitas

Peran DPRD (X1) Correlations

Kompetensi Legislatif (X2) Correlations

		Soal1	Soal2	Soal3	Soal4	Soal5	Total Skor			Soal1	Soal2	Soal2	Soal3	Soal4	Soal5	Total Skor
Soal1	Pearson Correlation	1	0.235	0.115	0.305	0.123	.593**	Soal1	Pearson Correlation	1	0.276	0.276	.522**	-0.045	.466**	.718**
	Sig. (2-tailed)		0.210	0.546	0.101	0.516	0.001		Sig. (2-tailed)		0.140	0.140	0.003	0.811	0.009	0.000
	N	30	30	30	30	30	30		N	30	30	30	30	30	30	30
Soal2	Pearson Correlation	0.235	1	0.194	0.007	0.295	.566**	Soal2	Pearson Correlation	0.276	1	1	0.273	0.119	.427*	.637**
	Sig. (2-tailed)	0.210		0.305	0.972	0.114	0.001		Sig. (2-tailed)	0.140			0.144	0.531	0.019	0.000
	N	30	30	30	30	30	30		N	30	30	30	30	30	30	30
Soal3	Pearson Correlation	0.115	0.194	1	0.130	0.302	.573**	Soal3	Pearson Correlation	.522**	0.273	0.273	1	0.176	.451*	.775**
	Sig. (2-tailed)	0.546	0.305		0.492	0.105	0.001		Sig. (2-tailed)	0.003	0.144	0.144		0.352	0.012	0.000
	N	30	30	30	30	30	30		N	30	30	30	30	30	30	30
Soal4	Pearson Correlation	0.305	0.007	0.130	1	0.263	.554**	Soal4	Pearson Correlation	-0.045	0.119	0.119	0.176	1	-0.058	0.332
	Sig. (2-tailed)	0.101	0.972	0.492		0.161	0.001		Sig. (2-tailed)	0.811	0.531	0.531	0.352		0.763	0.073
	N	30	30	30	30	30	30		N	30	30	30	30	30	30	30
Soal5	Pearson Correlation	0.123	0.295	0.302	0.263	1	.700**	Soal5	Pearson Correlation	.466**	.427*	.427*	.451*	-0.058	1	.729**
	Sig. (2-tailed)	0.516	0.114	0.105	0.161		0.000		Sig. (2-tailed)	0.009	0.019	0.019	0.012	0.763		0.000
	N	30	30	30	30	30	30		N	30	30	30	30	30	30	30
TotalSkor	Pearson Correlation	.593**	.566**	.573**	.554**	.700**	1	TotalSkor	Pearson Correlation	.718**	.637**	.637**	.775**	0.332	.729**	1
	Sig. (2-tailed)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000			Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.073	0.000	

N	30	30	30	30	30	30	N	30	30	30	30	30	30	30
---	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----

Komitmen organisasi (X3)

Correlations

		Soal1	Soal2	Soal3	Soal4	Soal5	Total Skor
Soal1	Pearson Correlation	1	0.267	0.140	.398*	.446*	.650**
	Sig. (2-tailed)		0.153	0.461	0.029	0.014	0.000
	N	30	30	30	30	30	30
Soal2	Pearson Correlation	0.267	1	0.344	.386*	.534**	.698**
	Sig. (2-tailed)	0.153		0.063	0.035	0.002	0.000
	N	30	30	30	30	30	30
Soal3	Pearson Correlation	0.140	0.344	1	.378*	.547**	.640**
	Sig. (2-tailed)	0.461	0.063		0.040	0.002	0.000
	N	30	30	30	30	30	30
Soal4	Pearson Correlation	.398*	.386*	.378*	1	.542**	.754**
	Sig. (2-tailed)	0.029	0.035	0.040		0.002	0.000
	N	30	30	30	30	30	30
Soal5	Pearson Correlation	.446*	.534**	.547**	.542**	1	.855**
	Sig. (2-tailed)	0.014	0.002	0.002	0.002		0.000
	N	30	30	30	30	30	30
TotalSkor	Pearson Correlation	.650**	.698**	.640**	.754**	.855**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

Penyusunan APBD (Y)

Correlations

		Soal1	Soal2	Soal2	Soal3	Soal4	Soal5	Total Skor
Soal1	Pearson Correlation	1	.620**	.620**	0.230	.572**	-0.033	.712**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.221	0.001	0.862	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Soal2	Pearson Correlation	.620**	1	1	0.075	.956**	0.179	.855**
	Sig. (2-tailed)	0.000			0.693	0.000	0.345	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Soal3	Pearson Correlation	0.230	0.075	0.075	1	0.051	0.348	.488**
	Sig. (2-tailed)	0.221	0.693	0.693		0.790	0.059	0.006
	N	30	30	30	30	30	30	30
Soal4	Pearson Correlation	.572**	.956**	.956**	0.051	1	0.164	.829**
	Sig. (2-tailed)	0.001	0.000	0.000	0.790		0.385	0.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Soal5	Pearson Correlation	-0.033	0.179	0.179	0.348	0.164	1	.481**
	Sig. (2-tailed)	0.862	0.345	0.345	0.059	0.385		0.007
	N	30	30	30	30	30	30	30
TotalSkor	Pearson Correlation	.712**	.855**	.855**	.488**	.829**	.481**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.006	0.000	0.007	

N	30	30	30	30	30	30	N	30	30	30	30	30	30	30	30
---	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 4 Uji Reliabilitas

1. Peran DPRD (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.554	5

2. Kompetensi Legislatif (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.732	5

3. Komitmen organisasi (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.764	5

4. Penyusunan APBD (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.706	5

Lampiran 5 Tabulasi Angket penelitian

No	Responden	Peran DPRD (X ₁)						Kompetensi Legislatif (X ₂)					Komitmen organisasi (X ₃)						Penyusunan APBD (Y)					
		1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	Total	1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	Total
1	JK	4	3	3	5	5	20	5	5	5	5	20	5	4	5	3	5	22	5	5	5	4	5	24
2	LM	4	3	4	3	4	18	5	4	4	4	17	5	3	4	4	3	19	5	3	4	4	4	20
3	GH	5	4	3	4	3	19	4	5	3	4	16	4	5	3	5	3	20	5	3	4	5	4	21
4	YH	4	3	4	3	5	19	5	3	4	4	16	5	3	3	4	5	20	5	3	4	4	5	21
5	MU	5	5	4	5	4	23	4	4	5	5	18	4	3	4	3	4	18	4	5	4	5	4	22
6	NU	5	4	5	4	5	23	4	5	5	5	19	4	4	5	4	5	22	3	4	5	5	5	22
7	MB	4	3	4	5	4	20	5	5	4	4	18	5	3	4	5	4	21	4	5	4	5	4	22
8	RI	3	4	4	4	4	19	4	5	5	4	18	4	4	4	4	3	19	5	4	4	5	4	22
9	LH	4	5	4	3	3	19	5	4	4	3	16	5	5	4	3	3	20	5	5	5	3	3	21
10	YD	5	3	4	5	4	21	4	4	5	4	17	4	3	4	5	4	20	5	4	4	5	4	22
11	AT	4	3	3	3	3	16	3	2	5	4	14	3	2	5	3	4	17	5	2	4	3	4	18
12	BN	4	3	4	4	3	18	5	3	4	3	15	5	3	4	4	3	19	4	3	5	4	3	19
13	BM	4	4	3	3	4	18	5	4	3	4	16	5	4	3	4	4	20	5	4	4	4	4	21
14	BT	5	4	4	5	5	23	5	5	5	5	20	4	3	4	5	5	21	5	5	4	5	5	24
15	RQ	4	4	4	3	4	19	5	5	4	4	18	5	4	4	3	4	20	5	4	5	3	4	21
16	IU	4	3	5	3	3	18	5	3	5	3	16	5	3	4	4	3	19	5	3	5	4	3	20
17	QP	4	4	3	3	3	17	5	4	4	4	17	5	4	4	3	4	20	4	4	4	3	4	19
18	LO	5	5	5	4	5	24	5	5	5	5	20	4	5	5	3	5	22	5	5	5	5	5	25
19	MN	4	4	3	5	4	20	5	5	5	4	19	5	3	4	4	4	20	5	4	5	4	4	22
20	MJ	4	3	4	5	3	19	4	4	4	5	17	4	3	4	4	3	18	5	5	4	4	3	21

21	KL	4	5	4	5	5	23	5	4	4	5	18	5	4	4	5	5	23	5	4	5	5	24
22	NB	3	3	4	5	4	19	4	3	4	4	15	4	3	4	3	4	18	4	3	5	4	20
23	AS	4	4	3	4	5	20	5	4	3	5	17	5	4	3	4	5	21	5	5	3	5	23
24	AH	4	4	4	5	3	20	5	5	5	5	20	4	4	4	5	3	20	5	5	5	5	23
25	SB	4	5	4	3	4	20	5	5	5	5	20	5	5	4	4	4	22	5	4	4	4	21
26	PS	5	5	5	4	5	24	4	5	4	5	18	4	5	5	4	5	23	5	5	5	5	25
27	MA	4	4	3	3	4	18	5	4	3	4	16	5	4	3	4	4	20	4	3	5	4	20
28	ML	4	3	5	4	4	20	4	3	5	4	16	5	3	5	5	4	22	5	5	5	4	23
29	MH	5	4	3	4	3	19	4	5	3	5	17	4	5	3	4	5	21	5	4	3	4	21
30	GE	4	4	4	3	4	19	5	4	5	4	18	5	4	5	3	4	21	4	4	4	5	21
31	JK	4	3	4	2	5	18	4	5	5	5	19	4	5	5	4	5	23	4	3	5	4	21
32	LM	4	3	4	4	4	19	4	3	4	4	15	5	3	4	4	4	20	5	5	5	4	23
33	GH	3	4	5	4	4	20	4	4	5	4	17	4	4	5	4	4	21	5	4	5	5	23
34	YH	5	3	3	5	5	21	5	5	5	5	20	5	3	3	5	5	21	5	4	5	4	23
35	MU	4	4	4	3	4	19	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	5	3	5	4	21
36	NU	5	4	5	5	4	23	4	4	5	4	17	4	3	4	4	4	19	4	3	5	5	21
37	MB	3	4	4	4	5	20	4	4	4	5	17	4	4	4	4	5	21	5	4	4	5	23
38	RI	4	4	3	4	4	19	4	4	4	4	16	4	4	3	4	3	18	5	5	5	4	22
39	LH	5	2	5	5	5	22	5	2	5	5	17	5	2	5	5	5	22	5	4	4	5	23
40	YD	4	4	3	3	4	18	5	4	4	4	17	5	4	4	3	4	20	5	4	4	5	22
41	AT	4	3	3	3	4	17	4	3	3	5	15	4	3	3	4	5	19	4	2	5	5	21
42	BN	5	3	5	5	3	21	4	3	5	3	15	4	3	5	5	3	20	4	5	5	5	22
43	BM	4	4	4	3	3	18	5	4	4	3	16	5	4	3	4	3	19	5	4	4	5	21
44	BT	4	3	5	5	4	21	4	5	5	5	19	4	3	4	5	4	20	5	5	5	5	24

45	RQ	4	3	4	3	4	18	5	4	4	5	18	5	4	3	4	3	19	5	3	4	4	5	21
46	IU	5	3	5	4	4	21	4	3	5	4	16	4	3	5	4	4	20	4	5	5	5	4	23
47	QP	4	4	3	5	3	19	5	4	4	4	17	5	4	3	4	3	19	5	3	4	4	4	20
48	LO	4	4	5	4	4	21	4	4	5	4	17	4	4	4	3	4	19	4	3	5	4	4	20
49	MN	5	3	3	3	5	19	4	3	4	5	16	4	3	4	5	5	21	4	5	4	3	5	21
50	MJ	4	4	5	4	4	21	5	4	5	4	18	4	3	4	4	3	18	5	3	5	4	4	21
51	KL	5	4	4	4	3	20	4	4	4	5	17	4	4	4	5	3	20	5	5	4	5	3	22
52	NB	4	3	4	4	4	19	4	4	5	4	17	4	2	4	4	4	18	5	5	4	3	4	21
53	AS	3	5	4	3	4	19	5	4	4	5	18	5	4	3	3	4	19	5	5	4	2	5	21
54	AH	4	5	5	4	2	20	4	5	5	2	16	4	5	5	4	2	20	5	5	5	4	2	21
55	SB	4	4	3	3	4	18	5	4	4	4	17	4	4	3	3	4	18	5	3	4	3	4	19
56	PS	3	3	3	4	5	18	4	3	3	5	15	4	3	3	5	5	20	5	2	4	4	5	20
57	MA	4	4	4	4	3	19	4	4	4	5	17	4	4	4	4	3	19	5	4	5	5	3	22
58	ML	4	3	3	4	4	18	4	3	5	4	16	4	3	3	5	4	19	4	2	5	5	4	20
59	MH	4	4	4	3	4	19	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	5	5	3	4	21
60	GE	5	3	4	3	3	18	5	5	4	3	17	5	5	3	3	3	19	4	3	5	5	3	20
61	JK	4	4	4	3	3	18	4	5	4	3	16	4	5	4	4	3	20	5	4	5	3	3	20
62	LM	4	4	3	5	4	20	5	4	4	5	18	3	4	4	5	4	20	4	5	4	5	4	22
63	GH	4	4	3	4	4	19	4	5	5	4	18	4	5	5	4	4	22	5	5	4	3	4	21
64	YH	5	3	3	4	5	20	5	3	4	5	17	5	3	3	4	5	20	5	3	4	5	5	22
65	MU	4	5	3	3	3	18	5	5	4	4	18	5	5	3	3	3	19	5	4	4	3	4	20
66	NU	4	4	4	5	4	21	4	5	4	4	17	4	3	4	4	4	19	4	5	5	4	4	22
67	MB	5	4	3	4	3	19	4	5	4	5	18	4	4	3	4	5	20	5	3	4	4	5	21
68	RI	4	3	5	4	3	19	4	4	5	3	16	4	4	5	5	3	21	4	4	4	5	3	20

69	LH	4	4	4	4	3	19	5	5	4	3	17	5	4	3	3	3	18	5	5	4	3	3	20
70	YD	5	4	4	3	4	20	4	4	3	4	15	4	4	4	3	4	19	4	3	3	4	4	18
71	AT	5	5	5	4	5	24	5	5	4	5	19	3	5	5	4	5	22	5	4	4	5	5	23
72	BN	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	17	5	4	4	4	4	21	5	5	5	2	4	21
73	BM	4	3	4	3	4	18	4	5	5	5	19	4	3	4	4	3	18	4	5	5	4	4	22

Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik

A. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		73
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.000000
	Std. Deviation	0.94039103
Most Extreme Differences	Absolute	0.061
	Positive	0.050
	Negative	-0.061
Test Statistic		0.061
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

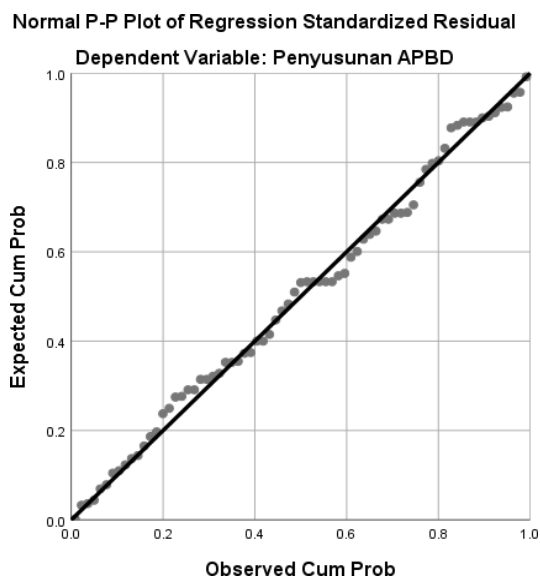
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

B. Output P.Plot



C. Uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	4.220	1.866		2.262	0.027		
	Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0.392	0.079	0.463	4.952	0.000	0.686	1.457
	Kompetensi Legislatif	0.221	0.093	0.215	2.369	0.021	0.730	1.369
	Komitmen Organisasi	0.286	0.097	0.265	2.938	0.004	0.739	1.353

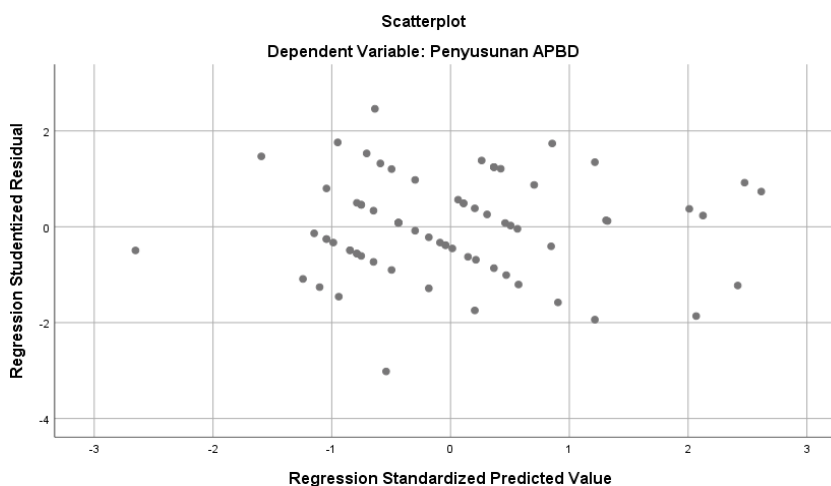
a. Dependent Variable: Penyusunan APBD

D. Uji Heterokedastisitas

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
		B		Beta		
1	(Constant)	0.265	1.145		0.232	0.817
	Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0.018	0.049	0.053	0.367	0.715
	Kompetensi Legislatif	-0.012	0.057	-0.030	-0.214	0.831
	Komitmen Organisasi	0.017	0.060	0.039	0.278	0.782

a. Dependent Variable: RES2

E. Scater Plots



Lampiran 7 Uji Hipotesis dan Analisis Linier Berganda

A. Uji t dan Analisis Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.220	1.866		2.262	0.027
	Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0.392	0.079	0.463	4.952	0.000
	Kompetensi Legislatif	0.221	0.093	0.215	2.369	0.021
	Komitmen Organisasi	0.286	0.097	0.265	2.938	0.004

a. Dependent Variable: Penyusunan APBD

B. Uji F (Simulatan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	89.999	3	30.000	32.510	.000 ^b
	Residual	63.672	69	0.923		
	Total	153.671	72			

a. Dependent Variable: Penyusunan APBD

b. Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi, Kompetensi Legislatif, Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

C. R2 Square

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.765 ^a	0.588	0.568	0.961

a. Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi, Kompetensi Legislatif, Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b. Dependent Variable: Penyusunan APBD

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agena: 2431/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/6/1/2022

Medan, 6/1/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : P/ Fitri Sari
NPM : 5170313
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian

berikut ini:

Identifikasi Masalah : Pemahaman Para Anggota DPRD Terhadap Penyusunan Laporan

Realisasi Anggaran : Di kantor DPRD Sumatera Utara.

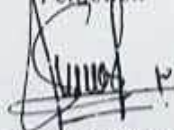
Rencana Penelitian : 1. Analisis Pengaruh Pemahaman Para Anggota DPRD Terhadap Anggaran Pemerintah Belanja Daerah Dalam Menyusun Laporan Realisasi Anggaran Di kantor DPRD Sumatera Utara.
2. Penerapan Sistem Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan di DPRD SUMUT
3. Analisis Terhadap Tren Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten di Sumatera Utara (Studi Komparatif tentang Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Otonomi Daerah).

Objek/Lokasi Penelitian : Kantor DPRD Sumatera Utara

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya

Pemohon



(Desy Fitri Sari)

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2431/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/6/1/2022

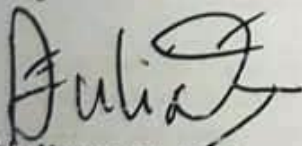
Nama Mahasiswa : Desy Fitri Sari
NPM : 1805170313
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul : 6/1/2022
Nama Dosen pembimbing*) : Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si, Ak , CA (12 Januari 2022)

Judul Disetujui**)

: Analisis Pengaruh Pemahaman Para Anggota DPRD
Terhadap Anggaran Pemerintah Belanja Daerah Dalam
Menyusun Laporan Realisasi Anggaran Di Kantor DPRD
Sumatera Utara

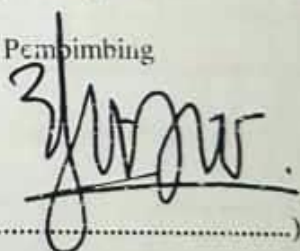
Disahkan oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si.)

Medan, Februari 2022

Dosen Pembimbing


(.....)

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20..... M



Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

D	E	S	Y	F	I	T	R	I	S	A	R	I		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

NPM :

1	8	0	5	1	7	0	3	1	3					
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Tempat.Tgl. Lahir :

B	A	T	A	M											
D	3		D	E	S	E	M	B	E	R		1	9	9	9

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa :

J	L		B	A	R	H	D	A		B	A	N	G	A	M	A	L
N	O		3	7	E												

Tempat Penelitian :

D	P	R	D		P	R	O	V	I	N	S	I		S	U	M	A	T	R
A					A														

Alamat Penelitian :

J	L		I	M	A	M		B	O	N	J	O	L		N	O		5
M	E	D	A	N		P	E	T	I	S	A	H						

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

- 1. Transkrip nilai sementara
- 2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Dr. Rulita Harum, SE, MSi)

Wassalam
Pemohon

(Desy Fitri Sari.....)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 282/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 10 Februari 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Desy Fitri Sari
NPM : 1805170313
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Pemahaman Para Anggota DPRD terhadap Anggaran
Pemerintah Belanja Daerah Dalam Menyusun Laporan Realisasi
Anggaran Di Kantor DPRD Sumatera Utara

Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 11 Februari 2023

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Diterapkan di : Medan
Pada Tanggal : 10 Rajab 1443 H
11 Februari 2022 M



Dekan

Eka Nurmala Sari, SE., MM., M.Si



Tembusan :
1. Peringgal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nomor : 280/IL3-AU/UMSU-05/F/2022
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 10 Rajab 1443 H
11 Februari 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
DPRD Provinsi Sumatera Utara
Jln. Imam Bonjol No. 5 Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Desy Fitri Sari
Npm : 1805170313
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Para Anggota DPRD terhadap Anggaran Pemerintah Belanja Daerah Dalam Menyusun Laporan Realisasi Anggaran Di Kantor DPRD Sumatera Utara

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Peninggal

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini Kamis, 16 Juni 2022 telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi
tentang bahwa :

- : Dedy Fitri Sari
- : 1805170313
- : Batam, 03 Desember 1999
- : Jln. Garuda GG amal no 37e
- : Pengaruh Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kompetensi Legislatif,
Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) DPRD Sumatera Utara

Disetujui / tidak disetujui *)

Nama	Komentar
	latar belakang lebih diungkap fenomena & kearifan masalah
	untuk ditrim baik kerangka konseptual
	metode penelitian populasi & sampel
	metode penelitian pustaka & jurnal Ditun Akt ditari
Perbaikan Minor	Seminar Ulang
Perbaikan Mayor	

Medan, 16 Jun 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Haruhap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Elza Nurmalia Sari SE., M.Si., Ak., CA

Pembanding

Sukma Lesmana, SE., M.Si

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Menyatakan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 16 Juni 2022 menerangkan bahwa:

- : Desy Fitri Sari
- : 1805170313
- : Batam, 03 Desember 1999
- : Jln. Garuda GG amal no 37e
- : Pengaruh Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kompetensi Legislatif, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DPRD Sumatera Utara

... dinyatakan sah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan
Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari SE.M.Si.Ak.CA

Medan, 16 Juni 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari SE, M.Si. Ak..CA

Pambanding

Sukma Desmana, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si

NIDN : 0105087601

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Imam Bonjol No. 5 Telp. (061) 4575001 - 4538333 Fax. (061) 4522270

Medan Kode Pos 20112

Email : Humas.dprdsulut@gmail.com

Medan, 17 Februari 2022

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-

M e d a n.

Nomor : 382.a/18/Sekr
Lampiran :
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 280/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 tanggal 11 Februari 2022 Perihal Izin Riset Pendahuluan, dengan ini memberikan Izin kepada Mahasiswa/i yang tersebut di bawah ini :

Nama : Desy Fitri Sari
NPM : 1805170313
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)

Untuk Melaksanakan Riset dalam rangka pengumpulan data untuk Penyusunan Skripsi dengan judul "*Analisis Pemahaman Para Anggota DPRD Terhadap Anggaran Pemerintah Belanja Daerah Dalam Menyusun Laporan Realisasi Anggaran Di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara*" di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Sekretariat DPRD-SU
2. Mengenakan pakaian yang sopan serta selalu menjaga ketertiban dilingkungan DPRD Provinsi Sumatera Utara
3. Melapor Kepada Kepala Bagian Umum Cq. Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian apabila telah selesai melaksanakan Riset.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN


Hj. TINI
PENATA TK.I
NIP. 19640312 198509 2 001